

Tahun 2025

PROFESIONALISASI

BK

JILID 2



RENATHA ERNAWATI

PROFESIONALISASI BK

JILID 2

Penulis:

Renatha Ernawati



UKI PRESS

Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi

Universitas Kristen Indonesia

Jakarta

2025

PROFESIONALISASI BK

JILID 2

Penulis:

Renatha Ernawati

Editor:

Eustalia Wigunawati. S.Psi., M.A.

ISBN: 978-623-8737-72-7

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta -
13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Profesionalisasi BK, Jilid 2" ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan kelanjutan dari jilid sebelumnya, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai profesionalisme dalam bidang Bimbingan dan Konseling.

Dalam jilid kedua ini, pembahasan difokuskan pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan konselor profesional. Topik-topik seperti pendidikan konselor, kompetensi inti yang harus dimiliki, kurikulum, tantangan praktik di lapangan, hingga dampak globalisasi dan kemajuan teknologi dibahas secara komprehensif dan kontekstual. Diharapkan, buku ini dapat menjadi bahan referensi yang berguna dalam pembelajaran, pelatihan, serta pengembangan layanan bimbingan dan konseling di berbagai jenjang pendidikan.

Buku ini juga menyajikan wawasan yang relevan dengan tantangan masa kini, termasuk pentingnya pendekatan multikultural, penguasaan teknologi digital dalam konseling, serta kebutuhan akan konselor yang adaptif dan beretika. Semua ini merupakan bagian dari upaya

membentuk konselor yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan mendorong lahirnya para konselor yang tangguh, profesional, dan berdedikasi tinggi dalam melayani peserta didik serta masyarakat luas.

Penulis

Jakarta, 10 Juni 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENGERTIAN PENDIDIKAN KONSELOR.....	1
BAB II.....	11
KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI OLEH SEORANG KONSELOR	11
BAB III	15
KURIKULUM PENDIDIKAN KONSELOR.....	15
STRUKTUR KURIKULUM DI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING	18
PRAKTIK LAPANGAN DAN PPL SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBENTUKAN KETERAMPILAN PRAKTIS	20
STANDAR DAN LEMBAGA YANG MENGATUR PENDIDIKAN	26
BAB IV.....	43
KEBUTUHAN KOMPETENSI EMOSIONAL DALAM PENDIDIKAN KONSELOR	43

BAB V	55
ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN KONSELOR	55
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM KONTEKS PENDIDIKAN KONSELOR GLOBAL	57
DAMPAK ISU GLOBAL TERHADAP PENDIDIKAN KONSELOR DI INDONESIA.....	59
SIMULASI DAN REKOMENDASI	66
 BAB VI	 69
CONTOH KASUS	69
 BAB VII	 75
PENGERTIAN BIMBINGAN	75
PENGERTIAN KONSELING	76
BIMBINGAN DAN KONSELING	77
 BAB VIII	 79
PROFESI	79
BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI.....	81

BAB IX	83
PENGERTIAN BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI	83
BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI YANG BERMARTABAT.....	111
PROFESI TENAGA BIMBINGAN DAN KONSELING YANG BERMARTABAT	114
BAB X.....	136
CONTOH KASUS	136
DAFTAR PUSTAKA	149

PROFESIONAL



BAB I

PENGERTIAN PENDIDIKAN KONSELOR

Menurut Ki Hajar Dewantara (1935), Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan potensi individu, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, melalui berbagai bentuk pembelajaran dan pengalaman yang terorganisir. Dalam konteks pendidikan formal, seperti madrasah atau sekolah, pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan kompetensi, serta menciptakan individu yang berpengetahuan, berakhlak, dan mampu berkontribusi dalam

masyarakat. Pendidikan juga menjadi sarana penting untuk membekali peserta didik agar siap menghadapi tantangan kehidupan secara intelektual, emosional, dan sosial. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, layanan bimbingan dan konseling menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

Konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang bimbingan dan konseling untuk membantu individu mengembangkan potensi dirinya, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan secara mandiri.

Konselor adalah tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling yang bertugas memberikan layanan bantuan kepada individu, baik secara individu maupun kelompok, agar mampu memahami diri, menyelesaikan permasalahan, serta mengembangkan potensi dan keterampilan hidup secara optimal. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa konselor memegang peran sentral dalam memberikan layanan konseling yang berkualitas, terutama dalam konteks pendidikan di madrasah. Konselor yang efektif dituntut memiliki kompetensi yang meliputi kepribadian, kemampuan teknis, serta kapasitas sosial, sehingga dapat menciptakan hubungan yang suportif dan ramah dengan konseli. Tugas konselor tidak hanya sebatas memberikan nasihat, tetapi juga menerapkan teknik-teknik

intervensi psikologis seperti hypno counseling untuk menangani berbagai masalah seperti kecemasan, stres, dan gangguan perilaku siswa.

Sementara itu, pendidikan konselor mengacu pada proses sistematis untuk mempersiapkan individu menjadi konselor profesional melalui pembelajaran teoritis dan praktik langsung yang terstruktur. Pendidikan konselor mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8. Pelatihan dan pendidikan konselor sangat penting karena banyak guru BK yang masih mengalami kekurangan dalam pengetahuan dan keterampilan konseling. Oleh karena itu, pendidikan konselor juga mencakup pengembangan berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan hypno counseling yang bertujuan meningkatkan kompetensi konselor dalam menerapkan strategi intervensi konseling yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan adanya pendidikan konselor yang berkualitas, diharapkan konselor mampu memberikan layanan bimbingan yang profesional dan berdampak positif terhadap perkembangan peserta didik.

Pendidikan konselor adalah proses pembelajaran formal dan sistematis yang dirancang untuk membentuk individu menjadi tenaga profesional di bidang bimbingan dan konseling. Pendidikan ini tidak hanya berfokus

pada pemberian teori, tetapi juga menekankan keterampilan praktis, pembentukan karakter, serta penguasaan nilai-nilai etika profesi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan konselor yang mampu membantu individu (khususnya peserta didik di sekolah) dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karier, serta mendampingi proses perkembangan mereka.

Untuk menjadi seorang konselor profesional, seseorang perlu menempuh pendidikan formal dalam program studi Bimbingan dan Konseling (BK) di perguruan tinggi. Berikut jenjang pendidikannya:

1. Strata 1 (S-1) Bimbingan dan Konseling

Merupakan tahap dasar bagi calon konselor. Di sini mahasiswa dibekali pengetahuan teoritis dan praktis tentang psikologi perkembangan, teori konseling, teknik konseling individual dan kelompok, etika profesi, serta keterampilan komunikasi konseling.

2. Strata 2 (S-2) Bimbingan dan Konseling / Konseling Profesional

Pada tahap ini, mahasiswa memperdalam pemahaman teoretis dan keterampilan intervensi yang lebih kompleks. Banyak lulusan S-2 menjadi konselor di jenjang pendidikan tinggi, klinik, atau lembaga layanan masyarakat.

3. Strata 3 (S-3) Bimbingan dan Konseling (opsional)

Diperuntukkan bagi mereka yang ingin menjadi peneliti, dosen, atau pengembang keilmuan dalam bidang konseling. Jenjang ini berfokus pada penelitian lanjutan dan pengembangan teori konseling.

1. Pelatihan dan Sertifikasi

Setelah atau selama menjalani pendidikan formal, seorang calon konselor juga wajib mengikuti berbagai pelatihan profesional dan sertifikasi untuk menunjang keahliannya, seperti:

Pelatihan keterampilan konseling khusus, seperti Hypno Counseling, CBT (Cognitive Behavior Therapy), konseling karier, konseling trauma, dll.

Program Sertifikasi Profesi dari asosiasi profesi seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia).

Praktik lapangan dan magang di sekolah, klinik, atau lembaga psikososial, yang menjadi bagian wajib dalam kurikulum pendidikan BK.

2. Pendidikan konselor dalam konteks keprofesian

bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan etika profesional dalam menjalankan peran sebagai

konselor. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah mempersiapkan calon konselor agar mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling secara profesional, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau madrasah

Secara lebih rinci, tujuan pendidikan konselor dalam keprofesian meliputi:

- a. Membentuk kompetensi profesional: Konselor harus menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pendidikan konselor membantu mereka memahami teori-teori konseling, teknik intervensi, hingga etika profesi.
- b. Meningkatkan efektivitas layanan: Melalui pendidikan dan pelatihan, konselor dapat memberikan layanan yang lebih tepat, efisien, dan berdampak terhadap perkembangan peserta didik. Dalam jurnal, pelatihan hipno konseling terbukti membantu konselor lebih efektif dalam menangani siswa dengan kecemasan, stres, atau masalah perilaku.
- c. Menanamkan nilai dan etika profesi: Seorang konselor tidak hanya bekerja berdasarkan keilmuan, tetapi juga berdasarkan nilai moral, empati, kejujuran, dan tanggung jawab. Pendidikan konselor menanamkan

prinsip-prinsip tersebut agar konselor mampu menjaga profesionalismenya dalam berinteraksi dengan konseli.

- d. Mempersiapkan konselor untuk berkembang secara berkelanjutan: Pendidikan konselor harus membekali individu dengan keterampilan belajar sepanjang hayat. Dunia konseling selalu berkembang, sehingga konselor harus siap melakukan refleksi diri, pengembangan diri, dan adaptasi terhadap pendekatan-pendekatan baru.

3. Peran Pendidikan dalam Membentuk Identitas Profesional Konselor

Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk identitas profesional konselor. Identitas profesional bukan hanya tentang penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam konseling, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai, etika, sikap, dan tanggung jawab profesi konselor itu sendiri. Pendidikan konselor tidak hanya menghasilkan seseorang yang “tahu cara melakukan konseling”, tetapi juga membentuk pribadi yang “menjadi konselor” secara utuh.

Pertama, melalui proses pendidikan, calon konselor dibekali dengan landasan filosofis, teoritis, dan praktis mengenai hakikat konseling dan perannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Di sinilah mereka mulai membangun

pemahaman siapa mereka sebagai calon konselor, apa tanggung jawab mereka, dan bagaimana mereka harus bersikap terhadap konseli.

Kedua, pendidikan memberikan pengalaman pembelajaran yang memungkinkan calon konselor mengenali nilai-nilai personal dan profesional, sekaligus mengintegrasikannya ke dalam praktik konseling. Identitas profesional berkembang melalui proses internalisasi nilai-nilai inti profesi seperti empati, kerahasiaan, kejujuran, kesetaraan, dan penerimaan tanpa syarat. Hal ini tidak bisa hanya diajarkan melalui teori, tetapi dibentuk lewat bimbingan dosen, supervisi praktik lapangan, refleksi diri, dan dialog etis selama proses pendidikan.

Ketiga, pendidikan membantu konselor memahami peran mereka dalam struktur sosial dan sistem pendidikan, termasuk bagaimana mereka bisa menjadi agen perubahan, pendamping perkembangan siswa, dan penjaga kesejahteraan psikologis individu. Dalam jurnal yang kamu unggah, terlihat jelas bahwa pendidikan konselor melalui pelatihan seperti hipno konseling dapat membentuk kepercayaan diri, kapasitas profesional, dan tanggung jawab moral para guru BK yang sebelumnya belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai konselor.

Keempat, melalui pendidikan, konselor mengembangkan sense of belonging terhadap

profesinya, yang membuat mereka bangga sebagai bagian dari komunitas profesional bimbingan dan konseling. Dengan memiliki identitas profesional yang kuat, konselor lebih siap menghadapi tantangan di lapangan, mampu menjunjung tinggi etika profesi, dan berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang.

Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi merupakan ruang pembentukan jati diri profesional seorang konselor. Dari sini lahir konselor-konselor yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berjiwa profesional, beretika, dan memiliki kesadaran diri dalam menjalankan profesinya.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB II

KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI OLEH SEORANG KONSELOR

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan konselor dalam memahami dan membimbing peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Konselor harus mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling secara sistematis. Artinya, konselor harus bisa memahami karakter peserta didik, termasuk cara mereka berpikir, merasakan, dan bersikap. Misalnya, saat siswa mengalami kecemasan menjelang ujian, konselor perlu memilih pendekatan yang tepat untuk membantu mereka merasa lebih tenang dan percaya diri. Selain itu, konselor juga harus mampu membuat program bimbingan yang terstruktur dan mudah diterapkan di sekolah.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian berkaitan dengan sikap, karakter, dan jati diri konselor sebagai pribadi yang dapat menjadi teladan. Konselor dituntut untuk memiliki sifat sabar, empatik, jujur, dan mampu mengendalikan emosi. Dalam proses konseling, konselor harus bisa

menciptakan suasana yang nyaman agar klien atau siswa merasa aman untuk terbuka. Seorang konselor juga harus mampu menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi. Dengan kepribadian yang baik, konselor dapat membangun hubungan yang kuat dengan konseli dan membuat proses konseling berjalan lebih efektif.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan konselor dalam berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain, baik dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, maupun orang tua. Konselor harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan sopan, serta terbuka dalam bekerja sama untuk mendukung perkembangan peserta didik. Misalnya, jika ada siswa yang sering bolos sekolah, konselor perlu bekerja sama dengan wali kelas, orang tua, dan bahkan teman sebaya siswa untuk mencari solusi bersama. Kemampuan menjalin kerja sama inilah yang akan membuat program bimbingan di sekolah berjalan dengan lancar.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan konselor dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan langsung dengan bidang bimbingan dan konseling. Konselor harus

memahami berbagai teori, teknik, pendekatan, dan alat dalam konseling, seperti konseling individual, kelompok, dan teknik seperti cognitive behavior therapy (CBT) atau hypno counseling. Konselor juga wajib mengikuti kode etik profesi agar dapat bekerja secara bertanggung jawab. Selain itu, seorang konselor harus terus belajar dan mengembangkan diri sesuai perkembangan zaman, misalnya dengan mengikuti pelatihan atau seminar, serta memanfaatkan teknologi untuk layanan konseling daring.



[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB III

KURIKULUM PENDIDIKAN KONSELOR

Artikel yang ditulis oleh Qurniati, Mud Dharminto, Evi Sepriati, Eka Hoiriyah, dan Ellin Zahara pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan regulasi pemerintah yang mengatur tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor diterapkan di tingkat satuan pendidikan menengah atas, khususnya di SMA Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan informan utama seperti kepala sekolah, guru Bimbingan dan Konseling (BK), wali kelas, dan siswa. Penelitian ini berfokus pada empat variabel penting yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam model implementasi kebijakan publik, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

Dari sisi komunikasi, pemerintah melalui dinas pendidikan telah melakukan berbagai

kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), penyuluhan, dan pelatihan (workshop) kepada guru dan tenaga kependidikan. Komunikasi yang dilakukan tidak bersifat memaksa, melainkan persuasif, sehingga menumbuhkan kesadaran guru-guru untuk mengikuti program dan memahami peran mereka sebagai pelaksana layanan BK. Hal ini menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan kebijakan.

Dalam aspek sumber daya, guru-guru BK di sekolah tersebut dinilai memiliki kapasitas dan kesiapan yang baik dalam menyusun dan menjalankan program BK. Mereka memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, telah mengikuti pelatihan teknis, dan mendapat dukungan dari pihak sekolah serta wali kelas. Bahkan, siswa sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya layanan BK karena merasa diperhatikan dan didampingi dalam mengatasi persoalan pribadi, sosial, belajar, maupun perencanaan karier.

Dari segi disposisi, seluruh elemen sekolah menunjukkan sikap yang positif dan antusias terhadap pelaksanaan program BK. Kepala sekolah mendorong para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan mendukung kegiatan BK. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan pun memperlihatkan komitmen kuat dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan secara terus menerus.

Struktur birokrasi juga telah berjalan cukup baik, terlihat dari adanya pembagian tugas, SOP, serta panduan pelaksanaan layanan BK. Hal ini memungkinkan pelaksanaan program menjadi lebih sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pengawas satuan pendidikan juga terlibat aktif dalam mendampingi dan mengawasi pelaksanaan program, sehingga kegiatan BK di sekolah menjadi lebih terarah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 dapat berjalan optimal jika keempat faktor tersebut berjalan sinergis. Sekolah yang memiliki komunikasi efektif, sumber daya yang kompeten, sikap yang positif, dan birokrasi yang tertata akan mampu menerapkan kebijakan dengan baik, sehingga layanan BK dapat berjalan maksimal.

Jika dikaitkan dengan Kurikulum Pendidikan Konselor, maka artikel ini menegaskan pentingnya kesiapan akademik dan profesional seorang konselor. Sesuai dengan Permendiknas No. 27 Tahun 2008, seorang konselor wajib memiliki kualifikasi akademik S1 dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta telah mengikuti Pendidikan Profesi Konselor. Kompetensi yang harus dimiliki meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Maka dari itu, Kurikulum Pendidikan Konselor harus mampu membekali calon konselor dengan landasan teori yang kuat, keterampilan praktik yang mendalam, serta nilai-nilai etis dan tanggung jawab profesional.

STRUKTUR KURIKULUM DI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Dalam konteks Struktur Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling, program pendidikan konselor biasanya dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu mata kuliah umum, mata kuliah dasar kependidikan, mata kuliah keahlian BK, mata kuliah praktik, serta program pendidikan profesi. Mata kuliah seperti Teori BK, Asesmen, Teknik Konseling Individual dan Kelompok, serta Layanan BK merupakan fondasi akademik. Sementara kegiatan praktik seperti observasi lapangan, magang, dan supervisi merupakan upaya menumbuhkan kompetensi profesional.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa konselor di SMA Bhakti Suci Jaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena mereka memiliki dasar pendidikan yang sesuai dan telah mendapatkan pengalaman melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa struktur kurikulum di program studi BK telah berhasil menyiapkan lulusan yang siap terjun ke lapangan kerja dan menjawab tantangan nyata di sekolah.

Lebih lanjut, artikel ini juga menunjukkan bahwa layanan BK bukan hanya pelengkap dalam pendidikan, tetapi merupakan pilar penting yang harus dilaksanakan secara profesional. Oleh karena itu, Program Studi BK perlu terus

mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan lapangan, memperkuat keterampilan praktik, serta membangun jejaring dengan instansi pendidikan untuk menjamin implementasi kebijakan dan keberhasilan program layanan di sekolah.

Sebagai kesimpulan, artikel ini memberikan gambaran nyata tentang pentingnya implementasi regulasi kebijakan profesi konselor di sekolah serta bagaimana Kurikulum Pendidikan Konselor dan struktur kurikulum program studi BK menjadi dasar utama untuk membentuk konselor yang profesional, kompeten, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Implementasi yang baik berangkat dari pendidikan yang terencana dan komprehensif, dan hasil pendidikan tersebut akan tercermin dari praktik layanan BK di sekolah-sekolah.

Dalam konteks Kurikulum Pendidikan Konselor, artikel ini menegaskan pentingnya konselor yang tidak hanya memiliki kemampuan teoritik, tetapi juga keterampilan praktis dalam melayani konseli. Permendiknas No. 27 Tahun 2008 menyebutkan bahwa konselor harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 dalam bidang Bimbingan dan Konseling, serta telah mengikuti Pendidikan Profesi Konselor.

Kurikulum pendidikan konselor idealnya membekali mahasiswa dengan empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian,

sosial, dan profesional. Untuk membentuk kompetensi-kompetensi tersebut, kurikulum harus terdiri atas mata kuliah teori dan mata kuliah praktik. Beberapa contoh mata kuliah penting dalam kurikulum antara lain Teori Konseling, Asesmen dalam BK, Layanan Konseling Individual dan Kelompok, hingga Etika Profesi.

PRAKTIK LAPANGAN DAN PPL SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBENTUKAN KETERAMPILAN PRAKTIS

Salah satu bagian krusial dalam Kurikulum Program Studi BK adalah praktik lapangan. Ini biasanya direalisasikan melalui dua tahapan utama, yaitu Praktik Lapangan Terbimbing (PLBK) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Keduanya dirancang untuk mengasah keterampilan praktis mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja nyata di lingkungan sekolah.

PLBK biasanya merupakan tahap awal, di mana mahasiswa melakukan observasi dan praktik terbimbing di sekolah mitra. Dalam tahap ini, mahasiswa mulai mengenal dinamika layanan konseling di sekolah, cara menangani kasus, menyusun rencana layanan, dan memahami struktur organisasi sekolah. Mereka belajar dari guru pembimbing (supervisor lapangan) dan mencatat berbagai strategi yang digunakan dalam praktik nyata.

PPL merupakan tahap lanjutan di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk menjalankan layanan bimbingan dan konseling secara langsung, baik dalam setting individual maupun kelompok. Mahasiswa juga melakukan asesmen terhadap permasalahan siswa, menyusun program layanan, serta berinteraksi dengan guru, orang tua, dan pihak sekolah lainnya. Pada fase ini, peran mahasiswa mulai mirip dengan konselor profesional, walaupun tetap dalam pengawasan.

Penelitian Qurniati et al. (2022) memperlihatkan bahwa guru BK di SMA Bhakti Suci Jaya sudah cukup siap dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena mereka telah melewati fase PLBK dan PPL dengan baik selama pendidikan mereka. Dengan kata lain, keberhasilan layanan BK di sekolah tersebut adalah bukti nyata dari pentingnya praktik lapangan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan konselor.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang kuat tentang pentingnya implementasi kebijakan yang mengatur profesi konselor di sekolah. Keberhasilan implementasi ini erat kaitannya dengan kesiapan personal guru BK yang dibentuk melalui kurikulum yang baik. Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling yang mencakup praktik lapangan seperti PLBK dan PPL terbukti mampu membentuk lulusan yang kompeten, profesional,

dan siap memberikan layanan yang bermakna kepada siswa.

Oleh karena itu, untuk menjamin mutu konselor di lapangan, institusi penyelenggara pendidikan BK perlu terus memperkuat porsi praktik dalam kurikulum, menjalin kerja sama dengan sekolah mitra, serta memastikan bahwa setiap mahasiswa mengalami pembelajaran otentik dalam setting yang sesungguhnya. Dengan demikian, cita-cita pelayanan BK yang optimal sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 dapat benar-benar tercapai di seluruh satuan pendidikan.

Artikel ini mengkaji secara mendalam mengenai Kurikulum Merdeka dan bagaimana peran konselor sekolah menjadi sangat penting dalam implementasi kurikulum tersebut. Dengan pendekatan kualitatif studi pustaka, penulis mengulas literatur relevan dan memberikan penekanan pada bagaimana kurikulum baru ini menekankan pengembangan literasi, numerasi, dan karakter siswa.

Kurikulum Merdeka menawarkan paradigma baru pendidikan yang menekankan student-centered learning, mengurangi beban administratif guru, menggantikan UN dan USBN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, serta memberikan otonomi lebih kepada sekolah dan guru.

Konselor sekolah dalam konteks ini dituntut bertransformasi menjadi agen perubahan, fasilitator, konsultan, terapis, koordinator, asesor, dan pengembang karir. Layanan bimbingan dan konseling diarahkan pada empat bidang utama: pribadi, sosial, belajar, dan karier. Peran konselor juga sangat penting dalam membentuk profil pelajar Pancasila melalui penguatan karakter siswa.

Kurikulum Pendidikan Konselor dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik dan profesional yang meliputi penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan praktis. Hal ini sangat selaras dengan tuntutan Kurikulum Merdeka yang membutuhkan:

- ✚ Konselor adaptif terhadap perubahan paradigma pendidikan.
- ✚ Penguasaan teknologi untuk layanan online dan hybrid.
- ✚ Kemampuan intervensi lintas bidang, seperti konsultasi, asesmen, dan pengembangan karier siswa.

Kurikulum Pendidikan Konselor juga mendukung pendidikan karakter, yang merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, mahasiswa BK dipersiapkan secara holistik, tidak hanya mampu memberikan layanan teknis, tetapi juga membentuk kepribadian siswa secara utuh.

Struktur kurikulum program studi BK secara umum terbagi atas tiga bagian besar:

- ❖ Mata Kuliah Dasar Keprofesian (MDK): Landasan teoritis tentang pendidikan, psikologi, dan dasar bimbingan konseling.
- ❖ Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB): Fokus pada keterampilan teknis seperti teknik konseling individual/kelompok, asesmen, intervensi krisis, dll.
- ❖ Mata Kuliah Praktik Profesi dan Magang (PPL/PPLK): Pembentukan keterampilan praktis dan penerapan di lapangan.

Dalam konteks artikel, struktur kurikulum ini sangat mendukung tuntutan peran konselor di era Merdeka Belajar. Mahasiswa yang telah dibekali MKB dan PPL diharapkan sudah mampu:

- a) Menyusun program layanan BK berbasis kebutuhan siswa.
- b) Mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap layanan.
- c) Menjalankan peran ganda (multi-role) sebagai fasilitator, konsultan, dan koordinator.

Praktik Lapangan (PPL) dalam pendidikan konselor merupakan wadah paling penting dalam pembentukan keterampilan praktis. Dalam PPL, mahasiswa:

- a) Terlibat langsung dengan dinamika sekolah dan kebutuhan siswa.

- b) Mengembangkan case study, asesmen psikologis, dan program layanan BK.
- c) Melatih empati, komunikasi, dan etika profesi dalam setting nyata.

Kurikulum Merdeka yang sangat dinamis dan menekankan kemandirian belajar serta penguatan karakter menuntut konselor untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara kontekstual dan inovatif. Oleh karena itu, PPL tidak hanya berperan sebagai ajang latihan, melainkan menjadi sarana transformasi menjadi konselor profesional yang adaptif, kreatif, dan siap menjadi agen perubahan.

Contoh implementasi keterampilan praktis yang relevan:

- ✚ Membuat modul layanan BK berbasis digital.
- ✚ Melakukan asesmen karakter siswa dan menyusun program pengembangan karakter.
- ✚ Menyusun kegiatan outdoor counseling yang menyatu dengan visi profil pelajar Pancasila.

Artikel oleh Dian Mego Anggraini, Ahmad Andry Budianto, dan Hanik Mufaridah (2023) memberikan pandangan yang relevan terhadap perubahan peran konselor dalam konteks Kurikulum Merdeka. Penekanan pada literasi, numerasi, dan karakter menuntut peran konselor menjadi semakin luas dan kompleks.

Kurikulum Pendidikan Konselor dan struktur kurikulum Program Studi BK telah sejalan dengan kebutuhan ini, terutama melalui pembekalan

kompetensi teoritis dan praktik. Peran PPL menjadi krusial dalam menjembatani teori dengan kenyataan di lapangan, sehingga lulusan program studi BK siap menjadi mitra strategis sekolah dalam menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka. Standar dan Lembaga yang Mengatur Pendidikan Konselor Peran LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).

STANDAR DAN LEMBAGA YANG MENGATUR PENDIDIKAN

Pendidikan konselor di Indonesia memiliki landasan regulasi yang kokoh. Salah satunya adalah Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menetapkan bahwa seorang konselor wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana di bidang bimbingan dan konseling serta mengikuti pendidikan profesi. Standar ini ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana konselor dikategorikan sebagai pendidik profesional yang sejajar dengan guru dan dosen.

LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan):

- LPTK berperan penting dalam menyiapkan tenaga pendidik, termasuk konselor.

- LPTK harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Standar ini mencakup kurikulum, kompetensi, dan fasilitas yang mendukung proses pendidikan.

Selain itu, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) berperan sebagai organisasi profesi yang menetapkan kode etik, standar layanan, serta mengembangkan kompetensi konselor melalui berbagai pelatihan, seminar, dan publikasi ilmiah. ABKIN juga berperan dalam merumuskan standar kompetensi lulusan pendidikan bimbingan dan konseling di Indonesia.

1. Regulasi dan Kebijakan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan regulasi yang mengatur Pendidikan konselor

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan konseling di sekolah.

Tak kalah penting, peran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Konselor yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjadi instrumen penting untuk menilai dan memastikan bahwa lulusan bimbingan dan konseling memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan siap bersaing secara profesional.

Peran LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan)

LPTK memegang peran strategis sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga pendidik, termasuk konselor. LPTK bertanggung jawab tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam memastikan lulusan memiliki kompetensi personal, sosial, pedagogik, dan profesional sesuai standar nasional.

Peran LPTK dalam Pendidikan Konselor:

- LPTK bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan.
- LPTK juga harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan pendidikan, seperti Kurikulum Merdeka Belajar.

Dalam konteks pendidikan konselor, LPTK menyelenggarakan Program Studi Bimbingan dan Konseling mulai jenjang Sarjana (S1) hingga Pendidikan Profesi Guru (PPG). Melalui proses ini, calon konselor dibekali pengetahuan teoretis dan keterampilan praktis, termasuk praktik lapangan di sekolah-sekolah atau lembaga bimbingan. Peran LPTK sangat krusial dalam menanamkan nilai-nilai etika profesi konselor dan memastikan lulusan siap menghadapi tantangan pendidikan kontemporer.

Integrasi dengan Kurikulum Merdeka Belajar (Fatimah et al., 2023)

Dalam jurnal Penerapan Prinsip-Prinsip Kurikulum Merdeka Belajar bagi Para Calon Konselor, Fatimah et al. (2023) mengkaji bagaimana kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diimplementasikan pada program studi Bimbingan dan Konseling. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus, berpartisipasi dalam kegiatan non-akademik, serta terlibat langsung di dunia kerja.

Kaitannya dengan Jurnal Penerapan Prinsip-Prinsip Kurikulum Merdeka Belajar

Kebijakan Merdeka Belajar : Merdeka Belajar adalah inisiatif yang memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual bagi siswa.

Implementasi di LPTK

- ❖ Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana LPTK menerapkan prinsip-prinsip Merdeka Belajar untuk calon konselor.
- ❖ Penerapan ini mencakup pengembangan model pembelajaran yang inovatif dan adaptif.

Tantangan dalam Implementasi

- ❖ Meskipun ada kebijakan, penerapan Merdeka Belajar di LPTK masih menghadapi berbagai tantangan.
- ❖ Kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi.

LPTK sebagai penyelenggara pendidikan konselor dituntut melakukan penyesuaian signifikan terhadap kurikulum. Salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang mengedepankan: Kebebasan belajar di luar program studi, fleksibilitas dalam menentukan materi pembelajaran, kolaborasi antar bidang ilmu, model pembelajaran berbasis proyek dan problem solving

Fatimah et al. (2023) menemukan bahwa meskipun prinsip-prinsip tersebut memberikan peluang besar untuk menyesuaikan kompetensi calon konselor dengan kebutuhan lapangan, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia di LPTK, infrastruktur pendukung, hingga sistem kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap konsep Merdeka Belajar.

Keterkaitan Standar, LPTK, dan Kurikulum Merdeka

Standar kompetensi profesi konselor yang ditetapkan ABKIN dan regulasi dari Kemendikbud

harus diakomodasi oleh kurikulum Merdeka Belajar di LPTK. Kurikulum baru ini memungkinkan mahasiswa bimbingan dan konseling melakukan pembelajaran berbasis pengalaman lapangan yang lebih luas, seperti magang di sekolah, lembaga konseling komunitas, hingga proyek sosial berbasis psikososial.

Penelitian Fatimah et al. menegaskan pentingnya desain model pembelajaran di LPTK yang mengintegrasikan prinsip Merdeka Belajar dengan standar layanan konseling. Tujuannya agar lulusan tidak hanya kompeten secara administratif dan akademis, tetapi juga memiliki soft skills, etika profesi, serta pengalaman nyata dalam menangani berbagai kasus di lapangan. Selain itu, ABKIN dan LSP Konselor perlu bersinergi dengan LPTK dalam merumuskan perangkat asesmen dan pelatihan berbasis Merdeka Belajar. Misalnya, menyusun modul pelatihan berbasis problem solving sesuai kasus aktual di masyarakat, yang dapat menjadi bagian dari kegiatan MBKM mahasiswa BK.

2. Standar dari Kemenristekdikti dan Kemendikbudristek

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, termasuk

untuk program studi Bimbingan dan Konseling. Standar ini mencakup kurikulum, kompetensi lulusan, dan kualifikasi dosen. Dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar, institusi pendidikan diberikan kebebasan untuk merancang kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan temuan Fatimah et al. (2023) yang menekankan pentingnya model pembelajaran yang adaptif untuk menyiapkan calon konselor yang siap menghadapi dinamika dunia pendidikan

a. Standar dari Kemenristekdikti dan Kemendikbudristek

- ✚ Kemenristekdikti dan Kemendikbudristek menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor.
- ✚ Standar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- ✚ Standar kompetensi ini mencakup kompetensi akademik (kualifikasi pendidikan minimal S1 Bimbingan dan Konseling) dan kompetensi profesional (penguasaan konsep keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan).

b. Kaitan dengan Jurnal:

- ✚ Kedua jurnal menekankan pentingnya kompetensi konselor.
- ✚ Jurnal "Penerapan Prinsip-Prinsip Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Para Calon Konselor" menyatakan bahwa konselor perlu membekali diri dengan kompetensi profesional sesuai dengan Peraturan Pendidikan No.19 Tahun 2005 Pasal 28 (6) yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
- ✚ Jurnal "Peran Kolaboratif Konselor di Sekolah Inklusif" juga menyinggung standar kompetensi konselor yang tertuang dalam peraturan Mendiknas RI nomor 27 tahun 2008.

Kaitannya dengan Jurnal Redita Yulianawati:
Peran Kolaboratif Konselor di Sekolah Inklusif

Peran Konselor di Sekolah Inklusif

- ❖ Jurnal ini membahas pentingnya peran kolaboratif konselor dalam mendukung siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusif.
- ❖ Konselor harus memiliki kompetensi yang baik untuk berkolaborasi dengan guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa.

Keterkaitan dengan Pendidikan Konselor

- ❖ Pendidikan konselor di LPTK harus mencakup pelatihan tentang kolaborasi dan inklusi, sesuai dengan tuntutan di lapangan.
- ❖ Dengan menerapkan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, calon konselor dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan di sekolah inklusif.

Rekomendasi untuk LPTK

- LPTK perlu mengintegrasikan pelatihan kolaboratif dalam kurikulum mereka untuk mempersiapkan konselor yang mampu bekerja di lingkungan inklusif.
- Hal ini akan meningkatkan kualitas layanan konseling dan mendukung keberhasilan siswa di sekolah.

c. Peran organisasi profesi seperti ABKIN, IPKIN, dan HIMABK

Organisasi profesi seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPKIN), dan Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling (HIMABK) memiliki peran penting dalam pengembangan profesi konselor. ABKIN, misalnya, menetapkan kode etik profesi, standar kompetensi, dan memberikan pelatihan serta sertifikasi bagi konselor. IPKIN berfokus pada pengembangan profesionalisme psikolog klinis, termasuk dalam

konteks bimbingan dan konseling. HIMABK sebagai organisasi mahasiswa berperan dalam pengembangan kompetensi calon konselor melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Kolaborasi antara organisasi-organisasi ini memastikan bahwa pendidikan dan praktik konseling di Indonesia berjalan sesuai dengan standar profesional dan etika yang berlaku.

Peran Organisasi Profesi (ABKIN, IPKIN, HIMABK)

- a. Organisasi profesi seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), IPKIN (Ikatan Profesi Konselor Indonesia), dan HIMABK (Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling) berperan dalam pengembangan profesionalitas konselor.
- b. Peran ini dapat mencakup peningkatan kompetensi, etika profesi, advokasi, dan pengembangan jaringan profesional.
- c. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam kedua jurnal, peran organisasi profesi ini penting dalam menjaga dan meningkatkan standar pendidikan konselor serta praktik bimbingan dan konseling di Indonesia.

Peran Organisasi Profesi

Organisasi seperti ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), IPKIN (Ikatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indonesia), dan HIMABK (Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling) berkontribusi dalam pengembangan profesionalisme konselor.

Mereka memberikan dukungan, pelatihan, dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi konselor di lapangan.

Tantangan Pada Pendidikan Konselor

Pendidikan konselor memiliki peran krusial dalam mempersiapkan tenaga profesional yang kompeten, beretika, dan siap menghadapi tantangan psikososial modern. Berdasarkan hasil kajian dari dua artikel jurnal terkait, makalah ini membahas secara mendalam tiga tantangan utama dalam pendidikan konselor:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Bimbingan dan Konseling (BK)

Pendidikan Bimbingan dan Konseling harus selaras dengan kebutuhan zaman. Mahasiswa BK tidak hanya perlu memahami teori-teori konseling, tetapi juga perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, problem solving, serta kepekaan sosial dan budaya. Transformasi kurikulum diperlukan agar lulusan tidak hanya menjadi 'pemberi layanan', tetapi juga fasilitator, agen perubahan, dan penggerak komunitas di sekolah. Salah satu strategi peningkatan mutu adalah melalui pendekatan experiential learning, di mana mahasiswa dilatih

langsung di lapangan sejak awal studi, serta melibatkan pelatihan berbasis teknologi seperti e-counseling dan digital mental health tools.

2. Penanaman Nilai-Nilai Etik Profesi

Etika adalah fondasi utama dalam profesi konselor. Namun, tantangan utama adalah bagaimana nilai-nilai etik tersebut tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga diinternalisasi. Strategi yang bisa dilakukan antara lain melalui pelatihan berbasis studi kasus, pemodelan perilaku etis oleh dosen dan praktisi, serta refleksi diri mahasiswa secara rutin. Etika konseling mencakup prinsip-prinsip kerahasiaan, empati, tanpa penghakiman, dan menghindari konflik kepentingan. Pendidikan BK harus mampu menjembatani antara nilai-nilai pribadi mahasiswa dan kode etik profesi agar tidak terjadi disonansi dalam praktik nyata.

3. Kesiapan Konselor Menghadapi Masalah Klien Modern

Tantangan konseling modern tidak hanya berasal dari aspek psikologis klien, tetapi juga dari konteks sosial-budaya yang lebih kompleks. Isu kesehatan mental meningkat, terutama pasca pandemi, diiringi dengan krisis identitas pada remaja dan maraknya cyberbullying. Konselor perlu memiliki literasi digital, pemahaman tentang budaya pop dan

media sosial, serta kemampuan untuk mengembangkan program pencegahan berbasis komunitas. Perlu dikembangkan pendekatan baru seperti konseling berbasis kekuatan (strength-based counseling), konseling multikultural, dan intervensi krisis yang cepat dan efektif.

Tantangan Dalam Pendidikan Konselor

Pendidikan konselor, khususnya di bidang Bimbingan dan Konseling (BK), memegang peran strategis dalam mencetak tenaga profesional yang mampu menghadapi tantangan zaman. Di era modern yang serba cepat dan kompleks, konselor dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kedalaman etika, pemahaman psikologis yang mendalam, serta kesiapan menghadapi isu-isu baru yang berkembang dalam masyarakat. Namun, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan konselor, yang bisa dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar: tantangan kualitas pendidikan BK, tantangan penanaman nilai etik, dan tantangan dalam kesiapan menghadapi masalah klien modern.

1. Tantangan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan BK
 - a. Kurangnya Integrasi antara Teori dan Praktik

Banyak program studi BK masih terlalu terfokus pada aspek teoretis. Mahasiswa lebih banyak diberikan pembelajaran konseptual daripada pengalaman nyata di lapangan.

- b. Keterbatasan Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Konselor jarang diberikan kesempatan mengikuti pelatihan atau pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan terkini.

- c. Minimnya Model Peran atau Mentor

Tidak semua institusi memiliki dosen atau praktisi yang mampu menjadi role model.

- d. Lemahnya Kesadaran Diri Konselor

Kesadaran diri adalah fondasi penting dalam proses konseling.

- e. Kualitas Pribadi Belum Menjadi Fokus

Orientasi akademik terlalu dominan dan kurang menekankan pembentukan karakter.

2. Tantangan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Etik

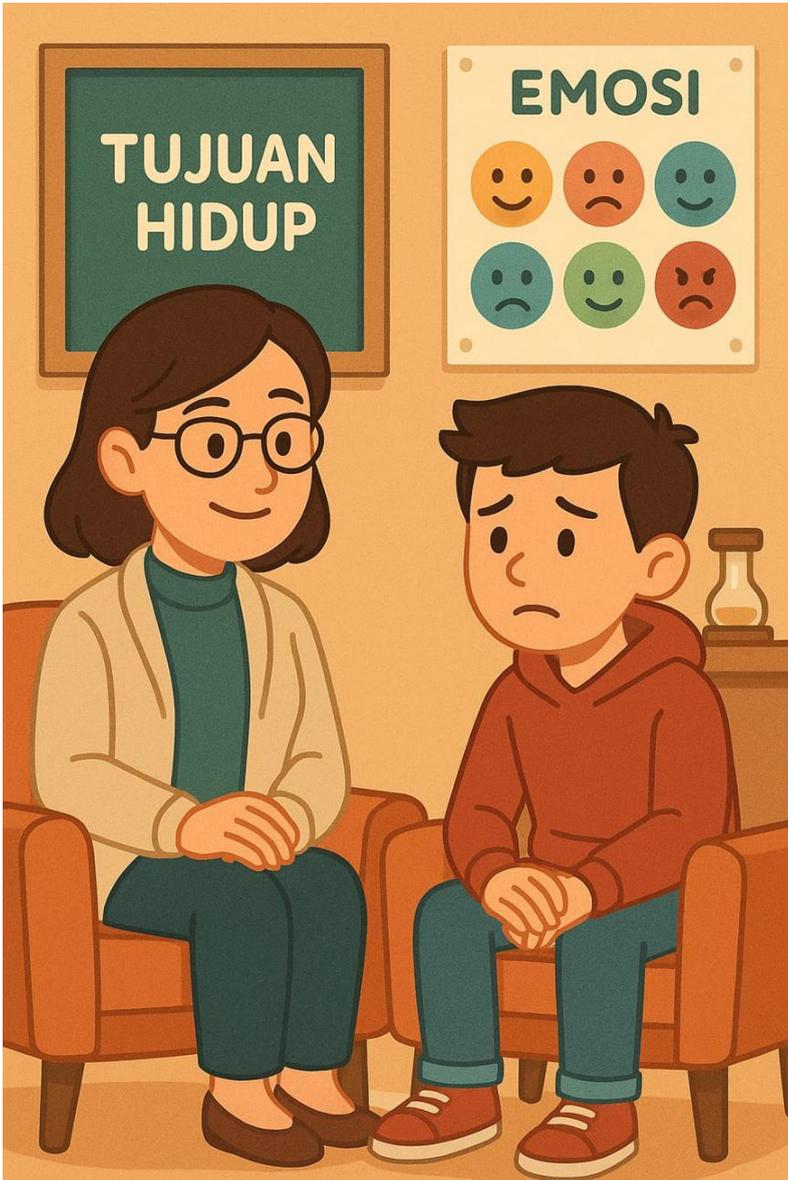
- a. Kurangnya Latihan Konkret tentang Etika

Pembelajaran etika sering hanya berupa hafalan kode etik tanpa latihan nyata.

- b. Konflik antara Nilai Pribadi dan Profesional
Konselor sering menghadapi dilema antara nilai pribadi dan profesional.
 - c. Lemahnya Kontrol Diri dan Refleksi
Konselor perlu kemampuan mengelola emosi pribadi.
 - d. Kurangnya Penekanan pada Tanggung Jawab Moral
Nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab belum ditanamkan secara kuat.
3. Tantangan dalam Kesiapan Menghadapi Masalah Klien Modern
- a. Kompleksitas Isu Kesehatan Mental
Depresi, kecemasan, dan trauma makin sering ditemui pada siswa.
 - b. Krisis Identitas dan Kebingungan Remaja
Konselor perlu memahami perkembangan identitas remaja.
 - c. Cyberbullying dan Tekanan Sosial Media
Konselor harus paham pendekatan berbasis teknologi.
 - d. Keragaman Budaya dan Nilai
Pentingnya kompetensi multikultural agar pelayanan bersifat inklusif.

e. Menjaga Profesionalisme dan Psikis
Konselor

Konselor perlu menjaga keseimbangan emosional dan praktik self-care.



BAB IV

KEBUTUHAN KOMPETENSI EMOSIONAL DALAM PENDIDIKAN KONSELOR

Dalam profesi konseling, kompetensi emosional sangat penting karena konselor harus berhadapan langsung dengan emosi dan perasaan klien yang kompleks. Sayangnya, dalam praktik pendidikan BK saat ini, aspek pengembangan emosi dan kepekaan perasaan belum mendapatkan porsi yang proporsional. Kompetensi seperti self-awareness, self-regulation, dan emotional resilience (ketahanan emosional) harus mulai diajarkan secara eksplisit kepada calon konselor. Mahasiswa BK perlu diberi kesempatan untuk mengenal emosi mereka sendiri melalui pelatihan refleksi, bimbingan individu, serta penggunaan alat seperti jurnal emosional. Pengalaman ini akan memperkaya kualitas hubungan konselor-konseli dan menghindarkan konselor dari burnout emosional.

1. Stigma Sosial terhadap Konselor Sekolah

Salah satu tantangan besar yang sering tidak dibahas secara mendalam dalam pendidikan konselor adalah stigma negatif terhadap guru BK atau konselor sekolah. Banyak siswa memandang konselor sebagai “polisi sekolah” atau “petugas pelapor pelanggaran”, bukan sebagai pendengar dan pembimbing. Stigma

ini muncul karena pendekatan lama yang terlalu menekankan disiplin dan koreksi perilaku, bukan pada pembinaan karakter dan pemulihan psikologis. Oleh karena itu, dalam pendidikan konselor, perlu ada penekanan baru pada pendekatan yang restoratif dan suportif, bukan hanya kuratif atau korektif. Konselor perlu menjadi figur yang menyenangkan, terbuka, dan dipercaya, bukan ditakuti.

2. Kesenjangan antara Teori dan Realita di Lapangan

Masih banyak mahasiswa BK yang merasa “kaget” ketika menghadapi kondisi nyata di lapangan. Dalam kelas, mereka belajar teknik wawancara dan empati, tetapi di lapangan mereka harus menghadapi siswa yang menolak konseling, orang tua yang tidak kooperatif, atau sistem sekolah yang tidak mendukung layanan BK. Kesenjangan ini harus dijembatani melalui pengalaman langsung dan studi kasus riil, bukan hanya pembelajaran berbasis buku. Program magang dan observasi lapangan seharusnya dilaksanakan lebih awal dan lebih sering dalam kurikulum, sehingga mahasiswa dapat memahami konteks kerja sebenarnya dan belajar mengembangkan fleksibilitas, kreativitas, dan strategi praktis.

3. Tantangan Teknologi dan Era Digital dalam Konseling

Perkembangan teknologi telah menciptakan lanskap baru dalam dunia konseling. Konselor kini dihadapkan pada kebutuhan untuk memahami digital well-being, dampak algoritma media sosial terhadap psikologis remaja, serta munculnya layanan e-counseling. Hal ini menuntut adanya literasi digital dalam kurikulum pendidikan BK. Mahasiswa perlu dilatih dalam penggunaan platform konseling digital, memahami etika privasi digital, serta mampu membangun hubungan terapeutik secara daring. Sebagai contoh, masalah seperti FOMO (Fear of Missing Out), pencitraan digital, dan kekerasan berbasis daring kini menjadi bagian dari dinamika klien yang harus dipahami secara menyeluruh. Tanpa pemahaman tersebut, konselor berisiko gagal membaca realitas kehidupan digital kliennya.

4. Tantangan dalam Pendekatan Multikultural

Konselor bekerja dalam masyarakat yang majemuk secara budaya, agama, bahasa, dan nilai. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan konselor untuk menanamkan pendekatan multikultural. Pendekatan ini membantu konselor untuk memahami sistem

nilai, kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda dari latar belakang klien. Tanpa pemahaman ini, hubungan antara konselor dan konseli bisa penuh bias, tidak sensitif secara budaya, dan berisiko menimbulkan resistensi dari klien. Pendidikan konselor harus mengajarkan teknik konseling lintas budaya, empati lintas agama, serta pemahaman atas isu-isu diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang mungkin dialami oleh klien.

5. Tantangan Pengembangan Diri dan Profesionalisme

Profesionalisme konselor tidak berhenti ketika lulus dari pendidikan formal. Justru, pengembangan diri yang berkelanjutan menjadi kunci agar konselor tetap relevan dan efektif dalam pelayanannya. Banyak konselor yang berhenti belajar setelah bekerja, padahal dinamika sosial dan psikologis masyarakat terus berubah cepat. Konselor yang tidak mengikuti perkembangan berisiko memberikan layanan yang ketinggalan zaman bahkan bisa berbahaya bagi klien. Maka, pendidikan konselor harus menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*). Mahasiswa perlu dilatih untuk terbuka terhadap supervisi, refleksi diri, serta aktif

mengikuti pelatihan dan forum profesional. Kegiatan seperti peer supervision, case conference, dan pelatihan berbasis riset harus diperkenalkan sejak awal perkuliahan agar menjadi kebiasaan dalam praktik profesional konseling nantinya.

6. Pentingnya Kesehatan Mental Konselor

Sebagai penyedia layanan mental, kesehatan mental konselor sendiri sering kali diabaikan. Dalam pendidikan konselor, masih jarang ada dukungan psikologis atau ruang pemulihan emosional bagi mahasiswa yang mengalami tekanan selama studi maupun saat menghadapi kasus-kasus konseling. Padahal, mahasiswa BK juga manusia yang memiliki trauma, luka batin, dan beban hidup. Jika tidak dikelola, kondisi ini bisa mengganggu kualitas bantuan yang mereka berikan kepada klien. Oleh karena itu, program BK perlu menyediakan layanan psikologis bagi mahasiswanya, membudayakan konseling antar teman sejawat, dan mendorong praktik self-care sejak dini.

7. Strategi Inovatif untuk Menjawab Tantangan

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, beberapa strategi inovatif yang bisa

diterapkan dalam pendidikan konselor antara lain:

- a) Integrasi teknologi dalam kurikulum, seperti simulasi konseling online, penggunaan AI dalam asesmen psikologis, dan pelatihan platform tele-counseling.
- b) Pendekatan holistik yang menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual mahasiswa.
- c) Mentoring peer-to-peer, di mana mahasiswa senior membimbing mahasiswa baru dalam mengenal dunia konseling secara praktis.
- d) Kolaborasi lintas disiplin, seperti kerjasama antara jurusan BK dengan psikologi, teknologi informasi, dan pendidikan khusus.
- e) Penguatan riset terapan, agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu meneliti dan menyelesaikan permasalahan nyata di sekolah dan masyarakat.

Pendidikan konselor memegang peranan penting dalam membentuk tenaga profesional yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif, etis, dan adaptif. Perlu reformasi kurikulum pendidikan BK yang lebih integratif, berorientasi pada pembentukan karakter, dan responsif

terhadap perubahan social. Pendidikan konselor tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Dibutuhkan kurikulum dinamis, dosen yang visioner, dan mahasiswa yang aktif dalam membentuk etika dan kompetensinya. Tantangan dalam pendidikan konselor hendaknya dijawab dengan kolaborasi antara institusi pendidikan, komunitas profesional, dan pemangku kepentingan lainnya. Inovasi, refleksi, dan pengembangan diri yang berkelanjutan adalah kunci bagi konselor masa depan yang tangguh dan relevan.

Pendidikan konselor adalah proses pembentukan manusia yang memiliki integritas, empati, kemampuan analitis, dan kepekaan sosial. Konselor bukan sekadar profesi teknis, tetapi panggilan untuk membantu sesama manusia menemukan makna hidup, harapan, dan solusi atas permasalahannya. Masa depan konseling akan semakin kompleks dan membutuhkan profesional yang berpikir kritis, bekerja dengan etika tinggi, serta mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, berbagai tantangan dalam pendidikan konselor harus dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk membentuk agen perubahan yang bermakna dalam masyarakat.

8. Pendidikan Konselor dalam Konteks Global

Di era globalisasi yang penuh dengan kemajuan teknologi dan dinamika sosial budaya, pendidikan konselor tidak lagi dapat dipandang sebagai disiplin yang bersifat lokal semata. Tantangan dan peluang yang muncul dari perkembangan global mengharuskan para pendidik dan praktisi konseling untuk mengadopsi pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perbedaan budaya serta perubahan di bidang kesehatan mental. Konselor pendidikan di berbagai negara berkembang dengan pendekatan yang beragam, yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, kebijakan pendidikan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui pemahaman secara mendalam mengenai perbandingan sistem pendidikan konselor antarnegara, serta isu-isu global seperti multikulturalisme dan pemanfaatan teknologi dalam konseling, kita dapat menarik pelajaran serta rekomendasi guna meningkatkan kualitas pendidikan konselor di Indonesia. Dalam materi ini, akan dibahas secara komprehensif mengenai perbandingan pendidikan konselor di beberapa negara, isu-isu global yang sedang hangat, serta tantangan dan peluang yang dapat dijadikan referensi untuk inovasi pendidikan konselor di tanah air.

9. Perbandingan Pendidikan Konselor di Negara-Negara Lain

Pendidikan konselor di dunia memiliki karakteristik yang beragam. Di Amerika Serikat, misalnya, para calon konselor menempuh program Magister Konseling dengan durasi dua tahun, yang mencakup pembelajaran teoritis serta praktik lapangan secara intensif. Sistem sertifikasi di Amerika yang diatur oleh dewan negara dan berbagai asosiasi profesional, seperti American Counseling Association (ACA), menekankan pentingnya memberikan standar kompetensi yang ketat. Model ini memberikan dasar yang kuat bagi para konselor untuk menangani isu kesehatan mental, konseling karir, serta permasalahan keluarga dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based).

Di Finlandia, pendekatan pendidikan konselor dilakukan secara terintegrasi antara pendidikan guru dan konselor. Konselor profesional di Finlandia umumnya memiliki gelar master yang diikuti dengan pelatihan tambahan mengenai kesehatan mental dan pendidikan peserta didik. Keunggulan sistem pendidikan mereka terletak pada penekanan pada dukungan holistik kepada peserta didik. Hal ini mencakup aspek emosional, akademik, dan sosial, sehingga konselor tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah individu, tetapi juga pada pencegahan dan penguatan kesejahteraan secara menyeluruh.

Di Singapura, keberagaman budaya dan multikulturalisme menjadi aspek penting dalam pendidikan konselor. Konselor di Singapura biasanya berasal dari latar belakang psikologi atau konseling dan disertifikasi oleh Singapore Association for Counseling (SAC). Model ini mengutamakan pelatihan intensif dalam pemahaman lintas budaya dan adaptasi terhadap lingkungan sosial yang multikultural. Dengan adanya dinamika antarbudaya yang kuat, para konselor di Singapura diwajibkan untuk menguasai berbagai bahasa serta memiliki kepekaan yang tinggi dalam menyikapi perbedaan nilai dan tradisi.

Sementara itu, di Australia, pendidikan konselor ditempuh melalui program sarjana atau isian yang terakreditasi oleh organisasi seperti Australian Counseling Association (ACA) atau Psychotherapy and Counseling Federation of Australia (PACFA). Di sana, pendekatan yang digunakan sangat menekankan pada terapi berbasis bukti, dengan integrasi antara teori, praktik lapangan, dan tindakan penelitian. Pendekatan ini mendorong para konselor untuk menggunakan metode-metode yang telah teruji secara ilmiah dalam memberikan layanan konseling, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi mereka.

Perbandingan antarnegara ini menunjukkan bahwa pendidikan konselor di luar negeri umumnya menekankan standar kompetensi yang

tinggi, praktik lapangan yang intensif, serta sertifikasi profesional yang ketat. Selain itu, pendekatan yang bersifat holistik dan multikultural telah menjadi ciri khas yang mendukung keberhasilan sistem konseling di negara-negara maju.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB V

ISU-ISU GLOBAL DALAM PENDIDIKAN KONSELOR

Seiring dengan berkembangnya globalisasi, muncul beberapa isu besar yang harus dihadapi oleh sistem pendidikan konselor di seluruh dunia. Salah satu isu penting adalah multikulturalisme. Di banyak negara, para konselor tidak hanya menghadapi klien dari satu latar belakang budaya saja, tetapi juga berbagai kelompok etnis, agama, dan latar belakang sosial yang berbeda. Hal ini mendorong perlunya kompetensi budaya dalam pendidikan konselor. Konselor harus dilatih untuk memahami nilai-nilai dan keunikan setiap kelompok budaya agar mereka dapat memberikan layanan yang inklusif dan tidak bias. Pendekatan multikultural dalam konseling keterampilan komunikasi yang baik, kesadaran diri yang tinggi, dan kemampuan untuk menghargai perbedaan sekaligus mencari titik temu dalam proses konseling.

Selain multikulturalisme, perkembangan teknologi juga menjadi isu global yang mempengaruhi seluruh aspek pendidikan konselor. Teknologi digital telah mengubah cara berkomunikasi antara konselor dan klien. Konseling berani (konseling online) kini menjadi alternatif yang populer, terutama di tengah pandemi dan era digital saat ini. Penggunaan video

call, chat, dan platform konseling digital membuka peluang untuk menjangkau klien di wilayah terpencil dan memudahkan proses akses layanan kesehatan mental. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti menjaga kerahasiaan data, memastikan keamanan komunikasi, serta menciptakan hubungan terapeutik yang efektif dalam format yang berani. Oleh karena itu, konselor pendidikan harus mencakup pelatihan dalam pemanfaatan teknologi informasi, etika digital, dan strategi membangun kepercayaan serta empati melalui media digital.

Isu global lain yang tidak kalah penting adalah tantangan kesehatan mental yang semakin kompleks. Di banyak negara, peningkatan angka kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya mendorong kebutuhan akan layanan konseling yang lebih adaptif dan responsif. Krisis identitas, masalah hubungan, dan tekanan sosial akibat modernisasi menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya permasalahan psikologis di kalangan remaja dan dewasa muda. Pendidikan konselor harus mampu memberikan kompetensi untuk mengenali, mendiagnosis, dan menangani berbagai kondisi kesehatan mental dengan pendekatan yang humanistik dan berbasis bukti. Selain itu, isu-isu seperti cyberbullying dan tekanan dari media sosial juga menuntut para konselor untuk

memiliki strategi khusus dalam menangani masalah yang muncul di dunia maya.

Selain itu, globalisasi membawa dampak pada pertukaran informasi dan budaya yang begitu cepat sehingga menciptakan tantangan dalam menjaga keaslian nilai-nilai budaya lokal. Di satu sisi, siswa dan klien mendapatkan akses ke informasi global yang sangat bervariasi, namun di sisi lain, konselor harus mampu membantu mereka memilah dan menyesuaikan nilai-nilai tersebut dengan identitas lokal yang ada. Tantangan ini menjadi krusial bagi konselor pendidikan dalam menciptakan pribadi yang tidak hanya cerdas secara global tetapi juga kuat dalam identitas kulturalnya.

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM KONTEKS PENDIDIKAN KONSELOR GLOBAL

Penting untuk mengetahui bahwa setiap sistem konselor pendidikan di dunia memiliki tantangan yang unik, namun terdapat pula peluang besar yang dapat diadaptasi oleh Indonesia. Di Amerika Serikat dan Australia, misalnya, standar pendidikan dan sertifikasi yang ketat memberikan jaminan bahwa lulusan benar-benar siap menghadapi dunia kerja. Namun, tantangan di sana adalah pengintegrasian aspek multikultural yang kian beragam di tengah masyarakat yang sangat heterogen. Di negara-negara seperti Singapura dan Finlandia,

keberhasilan dalam menggabungkan pendekatan holistik dengan pelatihan praktis menjadi contoh yang baik. Sistem yang mengutamakan praktik intensifikasi lapangan, dukungan dari lembaga sertifikasi, serta pemahaman budaya lokal telah terbukti efektif dalam menghasilkan konselor yang kompeten.

Untuk Indonesia, pelajaran dari negara-negara tersebut dapat disesuaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan konselor. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, misalnya, lembaga pendidikan dapat memperluas akses dan kualitas pembelajaran melalui platform berani, simulasi, dan modul interaktif. Selain itu, integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum konseling harus terus diperkuat agar lulusan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga budaya dan identitas yang kuat sesuai dengan jati diri bangsa. Penerapan standar nasional yang selaras dengan regulasi dari Kemenristekdikti, Kemendikbudristek, serta dukungan dari organisasi profesi seperti ABKIN, IPKIN, dan HIMABK akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konselor.

Peluang lainnya terletak pada peningkatan kerjasama internasional. Program pertukaran pelajar, seminar global, atau kolaborasi penelitian antarnegara dapat membuka pemandangan baru bagi calon konselor dalam memahami tren dan inovasi global. Hal ini tidak hanya mendorong

peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat jaringan profesional yang dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan global.

DAMPAK ISU GLOBAL TERHADAP PENDIDIKAN KONSELOR DI INDONESIA

Globalisasi dan kemajuan informasi teknologi telah memberikan dampak besar terhadap hampir semua aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan konselor di Indonesia. Perubahan ini sangat mempengaruhi cara konselor dilatih dan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dalam memberikan dukungan kepada individu dengan masalah kesehatan mental dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang dampak global terhadap konselor pendidikan di Indonesia menjadi semakin penting agar dapat memastikan bahwa konselor yang dihasilkan benar-benar siap menghadapi permasalahan yang semakin kompleks di masyarakat.

1. Transformasi Digital dalam Pendidikan Konselor

Perkembangan informasi telah memberikan dampak besar pada sistem pendidikan konselor, dengan mengubah cara tradisional yang terbatas oleh ruang dan waktu pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Sebelumnya, pendidikan konselor

di Indonesia lebih bergantung pada metode tatap muka di ruang kelas yang terlokalisasi di kota-kota besar, sehingga akses untuk siswa dari daerah terpencil sering kali terbatas. Namun dengan adanya teknologi, kini materi pembelajaran dapat diakses secara berani, memungkinkan siswa di seluruh pelosok Indonesia untuk mengikuti pelatihan dan mengakses berbagai materi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memfasilitasi interaksi antara siswa dan dosen serta siswa dengan konselor profesional dari berbagai belahan dunia. Sistem ini memberikan peluang bagi siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih beragam, dengan mengakses webinar, video pembelajaran, diskusi kelompok bold, serta platform pembelajaran berbasis aplikasi.

Namun penerapan teknologi ini juga menuntut kesiapan infrastruktur digital yang lebih baik, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak, serta pelatihan bagi pengajar untuk mengelola pembelajaran secara berani dengan cara yang aman dan efektif. Dalam konteks konseling, salah satu tantangan utama adalah mengelola privasi data dan keamanan informasi klien . Pendidikan konselor harus memperkenalkan aspek keamanan data digital sejak dini dalam kurikulum mereka, agar konselor mampu

menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh kliennya, bahkan dalam calon platform digital.

2. Peningkatan Kebutuhan Layanan Konseling yang Adaptif dan Berbasis Teknologi

Isu kesehatan mental telah menjadi masalah global yang semakin mendesak. Di Indonesia, perkembangan ini terlihat dari meningkatnya angka gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan identitas pada kalangan remaja dan dewasa muda. Tekanan sosial yang terus berkembang, terutama di tengah pandemi dan era digital, menciptakan tantangan baru dalam dunia konseling. Misalnya, fenomena cyberbullying, perundungan keberanian, serta dampak dari persaingan sosial yang diperburuk oleh media sosial semakin menambah masalah psikologis yang dihadapi generasi muda. Oleh karena itu, kebutuhan akan konselor yang mampu beradaptasi dengan permasalahan ini semakin mendesak.

Pendidikan konselor di Indonesia harus mampu merespons perkembangan ini dengan memperkenalkan pendekatan konseling berbasis teknologi. Kurikulum yang ada harus diperkaya dengan pembelajaran mengenai konseling digital, penggunaan aplikasi kesehatan mental, serta pemahaman tentang bagaimana media sosial

dapat mempengaruhi kesehatan mental individu. Pengenalan teknologi dalam dunia konseling tidak hanya terbatas pada penggunaan alat-alat digital untuk komunikasi antara konselor dan klien, tetapi juga mencakup pemahaman lebih lanjut mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan bagaimana konselor dapat membantu klien dalam mengelola keterpaparan terhadap informasi yang mempengaruhi emosi dan mental mereka.

Selain itu, konselor pendidikan harus memberi ruang bagi pengembangan metode konseling berbasis aplikasi yang dapat digunakan secara mandiri oleh klien. Misalnya, aplikasi yang membantu klien memonitor perasaan mereka sehari-hari atau melacak kemajuan dalam terapi. Dengan memberikan pelatihan dalam hal ini, konselor di masa depan akan memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi guna memberikan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh klien, khususnya yang berada di daerah terpencil.

3. Penguatan Kompetensi Multikultural dalam Kurikulum

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi konselor adalah keragaman budaya yang sangat mencolok di Indonesia. Negara kita terdiri dari ratusan suku, agama, dan bahasa

yang memiliki nilai-nilai, norma sosial, serta pandangan hidup yang sangat berbeda-beda. Globalisasi membawa dampak terhadap semakin cairnya batas-batas budaya lokal dengan budaya global. Oleh karena itu, penting bagi konselor pendidikan di Indonesia untuk memperkuat kompetensi multikultural dalam kurikulumnya.

Pendidikan konselor di Indonesia harus dapat mempersiapkan calon konselor untuk menghadapi perbedaan budaya, kepercayaan, dan bahasa yang mungkin dihadapi saat berinteraksi dengan klien. Dengan memperkenalkan elemen-elemen multikultural ke dalam pendidikan, para konselor akan lebih siap untuk memberikan layanan yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman yang ada. Hal ini juga dapat melibatkan pelatihan dalam teknik konseling yang menyesuaikan dengan budaya klien. Misalnya, bagi masyarakat yang lebih mengutamakan pendekatan keluarga dalam menyelesaikan masalah, konselor dapat mengajak keluarga untuk terlibat dalam proses konseling, bukan hanya klien individu.

Selain itu, adanya penguatan kompetensi multikultural akan sangat berguna dalam memperkenalkan pendekatan konseling yang lebih fleksibel dan adaptif. Dengan keterampilan ini, konselor dapat

menyesuaikan pendekatan mereka dengan latar belakang budaya klien, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip etika profesi. Pendekatan ini akan sangat relevan untuk mengatasi masalah-masalah psikologis yang sering kali terikat dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di komunitas masing-masing.

4. Kolaborasi Internasional dan Akses ke Pengetahuan Global

Globalisasi juga memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisi konselor pendidikan dengan meningkatkan kolaborasi internasional. Program pertukaran pelajar, seminar internasional, dan akses ke literatur akademik global telah memudahkan konselor di Indonesia untuk memperbarui pengetahuan mereka dan mempelajari praktik-praktik terbaik yang digunakan di negara lain. Kolaborasi ini membuka kesempatan bagi konselor Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Finlandia, dan Australia, yang memiliki sistem pendidikan konselor yang sudah sangat mapan.

Misalnya, konselor di Indonesia dapat mengadopsi metode konseling berbasis bukti yang digunakan di negara-negara tersebut, seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

atau teknik konseling berbasis trauma. Meskipun demikian, penting untuk selalu menyesuaikan pendekatan ini dengan nilai dan budaya lokal agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu, peluang untuk mengakses pengetahuan global juga membuka jalan bagi konselor Indonesia untuk menjadi bagian dari komunitas internasional, yang nantinya akan memperkaya wawasan mereka dan meningkatkan kualitas layanan konseling di Indonesia.

Kerja sama internasional ini juga dapat membantu Indonesia untuk memperkenalkan standar profesi konselor yang lebih diselenggarakan dan diakui secara global. Misalnya, mengadopsi standar sertifikasi yang setara dengan standar internasional dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat bahwa konselor Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni dan kompeten dalam menjalankannya.

Dampak global terhadap konselor pendidikan di Indonesia sangat signifikan. Perubahan dalam teknologi, meningkatnya masalah kesehatan mental, serta tantangan yang dihadapi oleh generasi muda membuat konselor pendidikan harus lebih responsif terhadap dinamika ini. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, konselor pendidikan

Indonesia perlu beradaptasi dengan mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum, memperkuat kompetensi multikultural, serta meningkatkan kerjasama internasional untuk memperkaya pengetahuan dan praktik profesional.

Meskipun tantangan global dapat mengubah cara konselor pendidikan dijalankan, peluang yang ditawarkan oleh globalisasi tidak dapat disia-siakan. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih inklusif, inovatif, dan adaptif, Indonesia dapat mempersiapkan konselor yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang tinggi, tetapi juga memiliki wawasan global dan pemahaman budaya yang luas. Hal ini akan memperkuat peran konselor Indonesia di tingkat nasional dan internasional, serta memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

SIMULASI DAN REKOMENDASI

Dalam konteks global, konselor pendidikan harus mampu menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktik yang bersifat universal dengan penyesuaian terhadap konteks budaya dan dinamika lokal. Perbandingan sistem pendidikan konselor di luar negeri menunjukkan bahwa standar sertifikasi yang ketat, pembelajaran praktis intensif, dan pendekatan

holistik merupakan komponen vital menghasilkan dalam konselor yang kompeten. Sementara itu, isu-isu global seperti multikulturalisme dan pemanfaatan teknologi menuntut inovasi terus-menerus agar konselor pendidikan tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif secara praktis.

Bagi Indonesia, peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal, seperti yang tercermin dalam warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan standar global merupakan suatu keharusan. Penguatan kurikulum yang berbasis pada kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, sosial, serta etika dan hukum harus selalu diselaraskan dengan dinamika global. Selain itu, peningkatan kolaborasi lintas lembaga—baik itu lembaga pendidikan, instansi pemerintah, maupun organisasi profesi—dapat memperkuat posisi konselor Indonesia dalam kancah internasional.

Rekomendasi utama untuk masa depan konselor pendidikan mencakup peningkatan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, perluasan program pelatihan yang mendalam mengenai sensitivitas budaya, serta penyusunan standar nasional yang selaras dengan standar internasional. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan konseling di darat, tetapi juga memastikan bahwa para konselor mampu bersaing dan beradaptasi di era global yang serba cepat.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB VI

CONTOH KASUS

Artikel dari situs Pendis Kemenag menyoroti transformasi peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang kini menjadi lebih proaktif dan relevan dalam membantu siswa mengenali potensi diri. Inisiatif Kemenag ini bertujuan untuk membekali guru BK dengan metodologi konseling modern, salah satunya melalui pemanfaatan TalentDNA. Pendekatan ini memungkinkan guru BK untuk tidak hanya mengatasi permasalahan siswa, tetapi juga secara sistematis mengidentifikasi bakat dan minat mereka, sehingga dapat memberikan bimbingan yang lebih terarah dalam pengembangan diri dan perencanaan masa depan. Dengan demikian, guru BK diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan mengoptimalkan potensi unik yang mereka miliki. Di lingkungan di mana siswa dididik untuk menyeimbangkan pemahaman ilmu agama dan ilmu umum, guru BK memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam pembentukan karakter yang kuat dan positif. Mereka juga menjadi garda terdepan dalam membantu siswa mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, eksistensi guru BK yang kompeten dan

responsif menjadi esensial dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan holistik siswa madrasah.

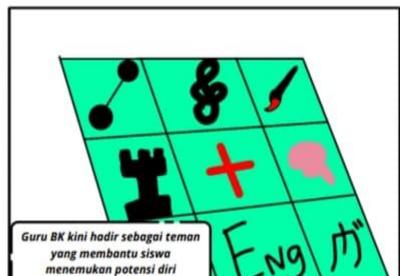
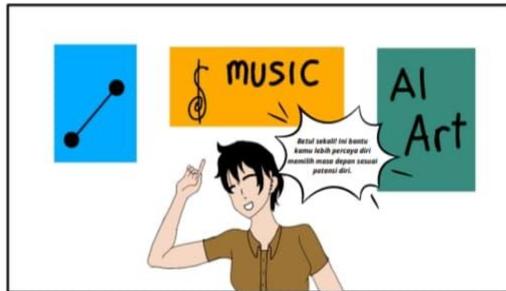
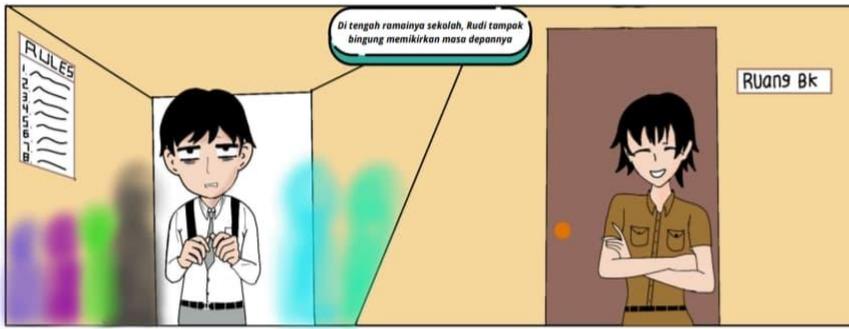
upaya Kemenag dalam meningkatkan kapasitas seluruh guru madrasah, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Program-program peningkatan kompetensi ini mencerminkan kesadaran akan dinamika perubahan zaman dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi dunia pendidikan, termasuk isu penurunan karakter siswa. Dalam konteks ini, guru BK diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengembalikan dan memperkuat nilai-nilai karakter luhur di kalangan siswa madrasah, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Tantangan yang dihadapi guru madrasah, termasuk upaya mengintegrasikan secara harmonis antara ilmu agama dan ilmu umum dalam pembentukan kepribadian siswa, juga menjadi perhatian dalam artikel ini. Guru BK, dengan pendekatan konseling berbasis potensi, diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kedua aspek ini. Dengan memahami potensi siswa, guru BK dapat membantu mereka menemukan jalur pendidikan dan pengembangan diri yang selaras dengan minat dan bakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang menjadi fondasi pendidikan di madrasah. guru BK di madrasah kini memiliki peran yang lebih strategis dan dinamis. Mereka tidak lagi hanya berfungsi sebagai pemecah

masalah, tetapi juga sebagai mitra siswa dalam menemukan dan mengembangkan potensi diri melalui metode seperti TalentDNA. Dengan demikian, guru BK madrasah diharapkan dapat berada di garis depan dalam upaya pembangunan karakter siswa yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan masa depan.



GURU BK

ZAMAN NOW



Di Ruang BK



[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB VII

PENGERTIAN BIMBINGAN

Menurut Sofyan dalam Ulfah (2022) mengatakan bahwa bimbingan merupakan sebuah proses dalam membantu individu dalam mencapai dalam memahami diri sendiri.

Nandang (2023) Bimbingan adalah sebuah cara atau proses dalam membantu Konseli dalam mengenali dirinya serta lingkungan Dimana ia berada dan merencanakan masa depannya. Dengan demikian Bimbingan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk membantu seorang individu yang sedang bermasalah atau juga memberikan bimbingan keppada individu yang membutuhkan bantuan. Bimbingan memiliki tujuan untuk:

- ✚ Mengenal dan mengetahui dirinya sendiri yang berkaitan dengan Minat, Bakat, Kelebihan, Kekurangan dan juga dalam Pengambilan Keputusan
- ✚ Membantu individu dalam memecahkan Masalah yang sedang dihadapi
- ✚ Membantu individu dalam meeningkatkan dan membangkitkan kemampuan sosial serta emosional yang dimiliki.

PENGERTIAN KONSELING

Konseling berasal dari Bahasa Inggris yaitu kata “to counsel” yang berarti menasehati. Selain itu konseling dalam Bahasa Latin yaitu “Consilium” yang berarti menerima dan memahami. Dalam Bahasa Anglo-Saxon berasal dari “Selan” yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Beberapa jurnal juga menjabarkan terkait konseling:

- ✚ Aqib 2012:29 dalam Ati 2019:4 mengatakan bahwa konseling adalah cara dalam membantu individu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.
- ✚ Prayitno dan Anti 2004:101 dalam Ati 2019:4 mengatakan Konseling merupakan kegiatan yang dilakukan secara tatap muka antara konseli dan konselor atau guru BK dengan tujuan membantu konseli dalam memahami dirinya dan menemukan potensi dirinya.
- ✚ Nandang (2023) Konseling merupakan adanya hubungan yang saling terikat dan tidak bisa dipisahkan yaitu antara konselor atau konseli yang memiliki tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dimiliki konseli.

Dengan demikian Konseling merupakan sebuah proses atau tahapan yang digunakan oleh seorang ahli seperti Psikologi, Konselor dalam membantu Konseli menangani masalah yang terjadi atau dialami oleh konseli tersebut. Dalam

proses Konseling adanya Asas yang mendasari proses konseling yaitu: Asas Kerahasiaan,Asas Kesukarelaan,Asas Keterbukaan, Asas Kegiatan, Asas Kemandirian, Asas Kedinamisan, Asas Tut Wuri Handayani, Asas Keterpaduan. Dengan adanya asas tersebut konseling akan berjalan dengan lancar

BIMBINGAN DAN KONSELING

Ati 2019:4 mengatakan bahwa Bimbingan dan Konseling merupakan kegiatan yang memiliki tujuan dalam memberikan bantuan yang dilakukan oleh ahli konseling kepada konseli yang dilakukan secara tatap muka.

Nandang (2023) mengatakan Bimbingan dan Konseling merupakan sesuatu yang sudah terikat dan berperan penting dalam dunia Pendidikan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian dalam system Pendidikan di inonesia sendiri juga sudah diatur dalam undang undang terkait bimbingan dan konseling itu sendiri yaitu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Dasar Menengah.

Dengan demikian Bimbingan dan Konseling merupakan sesuatu yang proses bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau klien dalam memahami diri,membantu memecahkan masalah baik dalam aspek Pribadi,Sosial, belajar dan juga Karier.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB VIII

PROFESI

1. Profesi menurut paraAhli

- ❖ Prakoso dan Tobing mengatakan profesi adalah sebutan atau jabatan yang memiliki memiliki pengetahuan khusus yang didapat melalui pelatihan atau pengalaman lain. Sehingga bisa membimbing, memberi nasihat dan saran untuk melayani dalam bidang profesi yang ditekuni
- ❖ Muchtar menyatakan profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dan jelas dari sebuah pekerjaan. Setiap Profesi adalah pekerjaan namun semua pekerjaan bukanlah profesi.
- ❖ Sumaryono memiliki defenisi profesi merupakan sebutan atau jabatan Dimana seseorang yang memilikinya mempunyai oengetahuan khusus yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman. Sehingga bisa ia gunakan dalam membantu orang disekitarnya yang membutuhkan bantuan sesuai dengan profesi yang dia geluti.
- ❖ Darmodiharjo dan Sidarta mengatakan profesia adalah sebuah pekerjaan yang ditekuni untuk menghasilkan uang

dalam menafkahi kehidupan dengan mengandalkan keahlian yang dimilikinya.

Aulia (2022) mengatakan Profesi merupakan bidang dalam pekerjaan yang didasari terhadap Pendidikan dan pengalaman serta pelatihan yang didapat. Amir (2019) profesi adalah pekerjaan yang ditekuni yang memerlukan sejumlah persyaratan yang harus diikuti dan diselesaikan oleh seseorang yang mau menekuni profesi tersebut.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwanya Profesi adalah pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang yang sudah pastinya menyelesaikan Pendidikan dan mengikuti pelatihan. Profesi dan Profesional tentunya dua halnya di dicara secara sekilas seperti mirip namun Ketika digali lebih dalam Profesi dan Profesional itu berbeda. Dimana Profesional merujuk pada Pendidikan keahlian secara khusus, Ilmu Sosial, Moral dan nilai kemanusiaan yang juga masuk kedalamnya. Sedangkan profesi merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut untuk mempunyai keahlian, tanggung jawab, Profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang namun harus pada orang yang sudah dipersiapkan untuk orofesi tersebut.

2. Ciri ciri dari Profesi

- a) Pekerjaan yang mempunyai fungsi sosial yang memiliki dampak yang cukup berpengaruh kepada Masyarakat
- b) Profesi menuntut seseorang untuk memiliki keterampilan yang diperoleh melalui Pendidikan dan juga pelatihan
- c) Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu
- d) Terdapat Kode Etik

BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI

Bimbingan konseling sebagai profesi berarti bahwa kegiatan bimbingan dan konseling bukan hanya berfokus dalam membantu individu dalam memecahkan masalah atau dalam mencari Solusi dalam masalah, Namun sebagai pekerja yang professional yang memerlukan Pendidikan, Pelatihan khusus yang harus ditekuni dan juga kode etik.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB IX

PENGERTIAN BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI

Profesi Bimbingan Konseling (BK) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung individu dalam mencapai kesejahteraan dan perkembangan optimal di berbagai aspek kehidupan, seperti pribadi, sosial, akademik, dan karir. Profesi bimbingan konseling yang awalnya berupa gerakan bimbingan (guidance movement) yang telah berlangsung pada awal tahun 1900-an di Amerika Serikat yang dipelopori oleh seorang tokoh besar yang bernama Frank Parson, dalam perkembangannya di Indonesia sebagai bagian integral pada praksis pendidikan formal sejak diberlakukannya kurikulum tahun 1975. Bimbingan Konseling tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemecahan masalah, tetapi juga sebagai proses pengembangan diri yang holistic. Dalam melaksanakan tugasnya, konselor harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai psikologi perkembangan, teknik konseling yang efektif, dan etika profesional.

Secara definisi bimbingan dan konseling berbeda, bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang didalamnya terkandung beberapa makna. Istilah bimbingan pertama kali muncul saat Frank

Parson memperkenalkan istilah bimbingan vocational untuk membantu para kaum muda dalam menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan (Gladding, 2015, hlm.9). Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti membimbing ataupun membantu sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.

Adapun sebagaimana Winkel menyatakan bahwa bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada individu atau kepada kelompok orang untuk membuat pilihan-pilihan secara berkesinambungan, bijaksana, dan dalam mengadakan penyesuaian hidup dan tuntunan sehingga ia mampu mengarahkan dirinya, dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan pada umumnya. Dalam pengertian di atas, disimpulkan bahwa bimbingan merupakan bantuan kepada seseorang secara pribadi dan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial atau perubahan dalam Masyarakat. Dimana prosesnya dilakukan secara sistematis dan mengarahkan kepada siswa untuk secara mandiri mencoba menyelesaikan masalah yang dihadapinya serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya serta pada umumnya beorientasi pada siswa yang mengalami

kesulitan belajar atau masalah-masalah dalam pendidikannya.

Sedangkan istilah konseling mulai dikenal saat Cifford Beers membantu para penderita kesehatan mental memperjuangkan hak mereka dalam memperoleh fasilitas, dan mereformasi perlakuan yang lebih baik terhadap mereka. Sehingga banyak orang di kalangan psikiatri dan psikologi klinis yang menyebut hlm ini sebagai konseling (Gladding, 2015: hlm.10). Istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu concilium yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai menerima atau memahami. Konseling adalah “bantuan yang diberikan kepada individu dalam menyelesaikan masalah kehidupannya melalui konselor dengan cara wawancara atau cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu untuk mencapai kesejahteraan hidup. Konseling berhubungan dengan get a way (memberi jalan), leading (memimpin), conduction (menuntun), Intruduction (petunjuk) regulation (mengatur), governing (mengarahkan) dan advice (menasehati).

Bersadarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa kata bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa ahli mengatakan bahwa konseling merupakan inti atau jantung hati dari kegiatan bimbingan. Menurut Hallen istilah bimbingan selalu dirangkai dengan istilah konseling. Hal ini karena bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang integral.

Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan diantara teknik lainnya.

Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu pekerjaan, tidak berganti ganti pekerjaan dan selalu bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, serta mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya. Istilah “profesi” memang selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keterampilan dan keahlian tertentu dari para petugasnya.

Bimbingan dan konseling merupakan suatu profesi yang dikategorikan sebagai profesi dalam lingkup pendidikan yang disebut profesi pendidik. Hal ini secara tegas dinyatakan pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 3 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mengatakan bahwa konselor dikategorikan sebagai pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling/konselor. Sedangkan guru bimbingan dan konseling menurut Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

Profesi bimbingan dan konseling merupakan jenis pekerjaan yang diampu konselor atau guru bimbingan dan konseling yang memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli pada satuan pendidikan. Dalam arti luas, profesi bimbingan dan konseling yang diampu oleh

konselor profesional dapat memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada anggota masyarakat berdasarkan kode etik profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Dalam era MEA (masyarakat ekonomi Asian) dijadikan momen penting dalam membangun profesi bimbingan dan konseling, sehingga ke depan profesi ini mampu bersaing dengan profesi lain dalam berunjuk karya di tengah kehidupan masyarakat global.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling sebagai profesi merupakan suatu hubungan yang saling berkaitan, dimana disana terdapat proses membantu orang lain atau bias dikatakan membimbing orang lain agar orang tersebut memiliki pribadi yang lebih baik dalam memahami dirinya yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan (profesi).

1. Kriteria Profesi Bimbingan dan Konseling

Ada tiga kriteria yang bisa menunjukkan profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi yang bermartabat, yaitu pengampunya:

- 1) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling yang dibangun dari ilmu psikologi, antropologi, sosiologi, dan pedagogi: Pada hakikatnya pelayanan bimbingan dan konseling merupakan praksis dari psikologi,

antropologi, sosiologi, dan pedagogi. Guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik profesional, lazimnya menguasai keempat ilmu tersebut yang berperan mendasari pembentukan kompetensi bimbingan dan konseling.

2) Menguasai kompetensi bimbingan dan konseling:

Kompetensi bimbingan dan konseling terumuskan pada Permendiknas RI Nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi konselor. Standar kompetensi konselor yang harus dikuasai oleh guru bimbingan dan konseling, terdiri dari 17 butir, yaitu:

- a. Menguasai teori dan praksis pendidikan yang terdiri dari tiga sub butir;
- b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, yang terdiri dari lima sub butir
- c. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan, yang terdiri dari tiga sub butir
- d. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, yang terdiri dari tiga sub butir
- e. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih, yang terdiri dari enam sub butir

- f. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, yang terdiri dari empat sub butir
- g. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi, yang terdiri dari empat sub butir
- h. mengaplikasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, yang terdiri dari tiga sub butir;
- i. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, yang terdiri dari tiga sub butir
- j. mengimplementasikan kolaborasi antar profesi, yang terdiri dari empat butir;
- k. menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, yang terdiri dari sembilan sub butir;
- l. Menguasai kerangka teoritis dan praksis bimbingan dan konseling, yang terdiri dari enam sub butir;
- m. merancang program bimbingan dan konseling, yang terdiri dari empat sub butir.
- n. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, yang terdiri dari empat sub butir;

- o. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, yang terdiri dari empat sub butir;
- p. memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional, yang terdiri dari tujuh sub butir; dan
- q. menguasai konsep dan praksis penelitian bimbingan dan konseling, yang terdiri dari empat sub butir.

2. Dibutuhkan dan dipercaya Masyarakat

Semua profesi yang bisa bertahan hidup di era disrupsi adalah profesi yang dibutuhkan dan dipercaya masyarakat sebagai pengguna, sedangkan profesi yang tidak dibutuhkan dan juga tidak dipercaya masyarakat, maka profesi tersebut akan mati. Untuk dapat mempertahankan bimbingan dan konseling sebagai profesi yang eksis dalam kehidupan masyarakat, diperlukan upaya dari pengampu profesi bimbingan dan konseling yaitu guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik profesional, dan para akademisi bimbingan dan konseling di perguruan tinggi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang tergabung dalam ABKIN untuk melakukan kolaborasi dalam meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga mampu bekerja sama secara positif dengan profesi lain dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat global.

Patut disadari oleh semua pihak lebih-lebih bagi guru bimbingan dan konseling bahwa dunia pendidikan, bimbingan dan konseling sekarang memasuki era internasional dan globalisasi yang tidak boleh kita abaikan dengan berbagai dampak internasional dan global dalam dunia pendidikan dan bimbingan dan konseling yang terus berpotensi mempengaruhinya sehingga perlu pertimbangan yang arif dan bijak terhadap dimensi internasional dan global tersebut. Konsekuensinya guru bimbingan dan konseling perlu membiasakan diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dalam rangka peningkatan profesionalitas termasuk dengan memetik pelajaran dengan kerangka pikir belajar eksperiensial yang berlangsung secara klasikal (Cyclical Experiential Learning Model, Kolb, 1984 dalam Triono 2009) sebagai bagian dari keseharian pelaksanaan tugasnya, dengan merekam serta merefleksikan hasil serta dampak kinerjanya dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling (reflective practitioner).

Guru BK senantiasa dituntut untuk memeriksa pelayanannya apakah sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu upaya memeriksa diri ini dilakukan penelitian tindakan, di samping pendekatan-pendekatan penelitian lainnya, termasuk studi kasus. Jenis penelitian terakhir ini sangat penting karena terkait dengan pelayanan konseling individual sebagai tolok ukur profesionalitas guru bk. Model-model penelitian

dengan kasus-kasus tunggal perlu dibicarakan tersendiri.

3. Status profesi guru bimbingan dan konseling di sekolah

Setiap guru memiliki standar kompetensi pada bidangnya masing-masing. Hal ini berlandaskan pada kinerja dan hasil yang didapatkan pada siswa dan untuk mencapai profesionalisme dalam dirinya. Seperti pada Guru Bimbingan dan Konseling (BK), yang kinerjanya ini meliputi: menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan melalui pemanfaatan hasil evaluasi, dan lain sebagainya (Hidayat et al., 2019). Dimana kinerja ini biasanya tidak terlihat secara fisik dalam proses pengerjaannya, sehingga seringkali ada pandangan bahwa guru BK ini sedikit kerjanya tetapi output yang didapat terkadang tidak terlihat. Keberadaan guru BK ini di sekolah menjadi banyak pertanyaan karena kurang pemahaman mengenai hal ini. Padahal lebih jauh dari hal tersebut, guru BK ini sangat menentukan kualitas murid atau siswa dalam proses pembelajaran. BK sendiri memiliki tugas untuk membantu peserta didik menjadi insan yang berguna dalam kehidupan yang memiliki berbagai wawasan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan lain sebagainya (Bahri, 2020).

Posisi tersebut yang mengharuskan seorang guru memiliki tingkat profesional nya, dan professional itu didapat apabila seseorang telah mencapai kualifikasi dan standarisasi keberhasilan suatu subjek.

Berdasarkan konteks lain, bahwa masyarakat umum memandang guru BK itu bukan suatu profesi yang sangat sulit, melainkan begitu mudah sehingga peminat akan profesi ini pun banyak. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Padahal di lain sisi, hampir semua kendali mengenai pendidikan, pelayanan siswa, sampai siswa tersebut melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya di pegang oleh guru BK. Hal ini justru menjadi lumrah dalam penafsiran, dimana harus diadakan nya pembuktian untuk sebuah kebenaran.

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut sebuah keahlian khusus dari para penugasnya. Sementara itu, Guru merupakan sebuah profesi atau pekerjaan yang sangat berjasa dan dihormati, karena seorang guru berperan penting dalam proses perkembangan peserta didik untuk mencapai kemampuan atau skills secara optimal (Hamid, 2017). Guru Bk termasuk kedalam profesi yang

suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan.pembelajaran. Guru adalah semua orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membimbing serta mendidik setiap murid. Tugas seorang guru bukan hanya mengajar materi saja, melainkan mengasuh, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, membentuk kepribadian peserta didik nya mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, menengah, dan atas dalam mempersiapkan dan mengembangkan generasi penerus bangsa yang unggul (Yunus, 2016).

Dengan begitu, seorang guru harus dapat menjaga sikap dan perilaku yang baik untuk menjadi teladan bagi peserta didiknya. Peserta didik akan menghargai guru nya apabila seorang guru memperlakukan peserta didik nya dengan baik. Maka dari itu hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh seorang guru yaitu sikap dan perilaku. Tugas guru sebagai profesi mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi.Adapun tugas guru sebagai profesi adalah sebagai berikut:

- ✚ Membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya

sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna.

- ✚ Membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap.
- ✚ Menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang.
- ✚ Menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari.
- ✚ Membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas.
- ✚ Mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain, dan
 - ✚ Mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia.

4. Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling sebagai Profesi Khusus

Secara keilmuan suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi jika pekerjaan tersebut diperoleh dari adanya usaha untuk

menguasai suatu bidang keilmuan sehingga memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai ilmu tersebut, pemerolehan pengetahuan ini didapatkan melalui proses pendidikan di mana program yang diambil telah diakui sebagai salah satu upaya menghasilkan lulusan yang professional di bidangnya, selain itu juga pekerjaan yang dijalankan haruslah memiliki kode etik untuk memperkuat kepercayaan publik (public trust) terhadap profesi yang dilakukan (Sari & Prayitno, 2021).

Etika tentang profesi berakar pada public trust yang mendefinisikan profesi itu menjadi kepedulian utama seluruh anggota kelompok professional. Setiap saat persepsi public terhadap profesi dapat berubah karena perilaku yang tidak etis, tidak professional dan tidak bertanggung jawab dari para anggotanya. Seorang guru bk atau konselor professional mesti menaruh kepedulian khusus terhadap klien karena klien amat rawan untuk dimanipulasi dan dieksploitasi .

Kode merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan tanda terhadap sesuatu yang dianggap penting. Kode dapat berupa simbol ataupun tulisan yang memiliki makna. Nurfuadi (2012, hlm.147), mengungkapkan bahwa kode memiliki arti tulisan (berupa kata- kata, tanda) dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud tertentu Sedangkan Etik diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang dapat diterima oleh masyarakat yang berada pada suatu lingkungan,

sehingga baik buruk akan sesuatu hal dilihat dari norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Bixler & Seaman (Suherman, 2007, hlm.43), menyatakan bahwa “etika merupakan prinsip-prinsip dari suatu tindakan yang berdasarkan sistem nilai yang biasa berlaku di suatu tempat”. kode etik disusun untuk memberikan batasan pada para profesional tentang tingkah laku yang etis. Diharapkan individu dengan profesi tertentu dapat berperilaku pantas. Adanya kode etik dalam profesi Bimbingan dan konseling sangatlah penting karena kode etik dalam suatu profesi merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. Kode etik mengarahkan pada perilaku organisasi atau anggota profesi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan yang diambil.

Profesi sendiri berasal dari bahasa latin “*professus*” yang memiliki pengertian “suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius” (Idi dan Safarina, 2016, hlm.98). Van Hoose dan Kottler (Gladding, 2015, hlm.68), menyebutkan bahwa terdapat tiga alasan mengenai pentingnya keberadaan kode etik, diantaranya: a. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh undang-

undang. b. Kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi. c. Kode etik melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan mal-praktik. Jika konselor bertindak sesuai batas-batas etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum.

Kode etik merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah profesi karena memiliki fungsi sebagai aturan dasar atau pedoman perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota profesi. Masyarakat yang menggunakan jasa dari sebuah profesi akan merasa aman dan terlindungi karena pada kode etik yang dilindungi bukan hanya profesinya tetapi juga individu yang menerima layanan dari profesi tersebut. Beberapa ahli mengemukakan pengertian kode etik, di antaranya: Wibowo; Woolfe, Ray & Windy; dan organisasi profesi ACA (Suherman, 2007, hlm.44).

Menurut Wibowo (Suherman, 2007, hlm.44), mengemukakan bahwa kode etik merupakan salah satu syarat penting bagi eksistensi profesi konseling atau sebagai jati diri profesi konseling. Oleh karena itu, tuntutan bagi seorang konselor adalah dengan menunjukkan sikap profesionalisme yang konsisten dengan nilai-nilai yang ada dan berlaku di masyarakat. Ahli lain, yaitu Woolfe, Ray & Windy (Suherman, 2007, hlm.44), mengemukakan bahwa Kode etik profesi

yaitu serangkaian peraturan profesional yang harus dipergunakan para anggota suatu. profesi dalam pelaksanaan praktek profesionalnya. Aturan-aturan itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan oleh semua anggota profesi dalam pemberian layanannya.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, sebagai pedoman berperilaku individu dalam berperilaku yang etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jika dikaitkan dengan profesi, maka kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan seorang anggota dalam menjalankan suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian semua anggota profesi harus tunduk pada aturan-aturan standar itu sebab bagi yang melanggar akan diberikan sanksi atau hukuman oleh masyarakat organisasi.

Kode etik suatu organisasi profesi secara spesifik harus menjelaskan kepada para anggotanya mengenai prinsip-prinsip yang membatasi tingkah laku anggota-anggotanya dan menjadi dasar bagi pengaduan-pengaduan etis yang dihadapi para anggotanya. Karena itu kode

etik biasanya memuat hubungan layanan, kerahasiaan, tanggung jawab profesional, hubungan dengan profesi lain evaluasi dan interpretasi, pendidikan dan latihan, penelitian, publikasi dan penetapan atau memecahan isu etik (America Counseling Asosiations: Code of Ethic and Standards of Practice, 1996).

Suatu organisasi profesi kode etik dapat mengembangkan dan memajukan profesi; memantau dan memperluas bidang gerak profesi, menghimpun dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Manfaat yang diperoleh dengan adanya profesi BK, yaitu membangun kepercayaan masyarakat mengenai adanya suatu persepsi tentang kompetensi. Organisasi profesi untuk guru BK juga berpotensi mengembangkan kemampuan anggotanya, sehingga kompetensi kependidikan yang andal pada diri tenaga kependidikan dapat terwujud dengan baik. hal ini sesuai dalam UUSPN 1989 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa: “Tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa”. Sebagai anggota organisasi, guru BK tidak hanya berkewajiban memberikan sejumlah iuran rutin saja. Guru BK juga wajib mewujudkan profesionalitasnya. Guru BK akan dituntut untuk

berpartisipasi aktif, seperti mengkomunikasikan berbagai pikiran dan pengalaman yang mengarah kepada pembaharuan dan perbaikan mutu Pendidikan

Dalam Bimbingan dan konseling di Indonesia, memiliki kode etik profesi yang telah disusun oleh organisasi profesi ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Walaupun lebih dikenal sebagai bidang keilmuan yang bergerak dalam bidang pendidikan formal namun, bimbingan dan konseling dapat bergerak pula dalam pendidikan non formal. Dengan adanya kode etik, ranah kinerja bimbingan dan konseling pada bidang pendidikan formal maupun non formal tetap berpedoman pada aturan etik atau kode etik yang sama. Menurut ABKIN (2010: hlm 2-3), kode etik profesi bimbingan dan konseling indonesia memiliki lima tujuan, yaitu:

- a. Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.
- b. Membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional.
- c. Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)
- d. Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan

permasalahan yang datang dari dan mengenal diri anggota profesi.

- e. Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka seorang guru BK maupun konselor harus memiliki kode etik dalam memberikan suatu layanan konseling. Etika konseling harus melibatkan kesadaran dan komitmen untuk memelihara pentingnya tanggung jawab melindungi kepercayaan klien (client trust). Seorang konselor atau guru BK harus menyadari akan kemungkinan pengaruh tindakannya terhadap status klien pada saat ini dan yang akan datang dan harus mampu membuat judgment moral/etika.

Kode etik suatu profesi muncul sebagai wujud pengaturan diri dari profesi tersebut. Suatu organisasi profesi harus mengembangkan kode etik secara adil. Kode etik merupakan aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal di dalam suatu profesi dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku perilaku malpraktik. Kode etik professional merupakan variabel kognitif penting yang akan mempengaruhi pertimbangan etis dari seorang konselor professional. Kode etik menyiapkan panduan berkenaan dengan parameter etik profesi (Pardodi Maba et al., 2018).

Kode etik profesi merupakan norma-norma yang harus dipatuhi dan diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di masyarakat. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan menerapkannya, namun lebih luas seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogik. Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor (Sujadi, 2018). Kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat (Kartadinata, 2011).

Menurut Abkin (2006:94) kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik (Sujadi, 2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh (ABKIN, 2006) memuat hal-hal berikut:

- ❖ Kualifikasi; bahwa konselor wajib memiliki a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang Bimbingan dan

Konseling, b) memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai Konselor.

- ❖ Informasi, testing dan riset; a) penyimpanan dan penggunaan informasi, b) testing, diberikan kepada Konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya, c) riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan.
- ❖ Proses pada pelayanan; a) hubungan dalam pemberian pada pelayanan, b) hubungan dengan klien.
- ❖ Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain; a) pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat; b) alih tangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien tersebut.
- ❖ Hubungan kelembagaan; memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan
- ❖ Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain; 1) konselor praktik mandiri, menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara private, 2) laporan kepada pihak lain.
- ❖ Ketaatan kepada profesi, 1) pelaksanaan hak dan kewajiban, serta 2) pelanggaran terhadap kode etik.
- ❖ Kesadaran pada Guru BK dapat membuat profesi BK memiliki martabat yang baik, yaitu

dengan menegakkan kode etik profesi BK. Guru BK/Konselor sebaiknya memiliki sikap idealis dengan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya. Juga konselor harus memiliki perilaku altruistik atau mementingkan untuk membantu orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kualitas kepribadian juga harus selalu ditingkatkan konselor. Seperti yang diungkapkan Sukartini (2011: 17) ciri kepribadian yang baik antara lain: (1) bertaqwa dan beriman kepada Tuhan YME; (2) memiliki pemikiran positif dan tanggap tentang manusia sebagai makhluk agamis, beretika, individu dan sosial; (3) memiliki sikap demokratis dan menghargai hak dan harkat dan martabat orang lain; (4) memiliki akhlak yang terpuji dan menjunjung tinggi nilai, norma, dan etika yang digunakan; (5) menunjukkan kesatuan keseimbangan kepribadian dan emosional yang matang; dan (6) memiliki penampilan yang menarik dan berpikir cerdas, kreatif, dan mandiri (JUMRAWARSI et al., 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kode etik suatu profesi muncul sebagai wujud Self-regulation dari profesi itu. Suatu organisasi profesi harus mengembangkan kode etik secara fair. Kode etik merupakan aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah

ketidaksepakatan internal didalam suatu profesi dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malapraktik. Kode etik professional merupakan variabel kognitif yang penting yang mempengaruhi pertimbangan etis dari seorang konselor professional. Kode etik menyiapkan panduan berkenaan dengan parameter kode etik profesi. Kode etik konselor di Indonesia telah dirumuskan, disepakati dan perlu terus di sempurnakan, memerlukan penegasan dalam implementasi dan supervise. Penegasan identitas profesi Bimbingan dan konseling harus diwujudkan dalam implementasi kode etik dan supervisinya.

Pelanggaran terhadap kode etik BK yang dilakukan oleh anggota profesi tentu akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan ABKIN. Maka dari itu, untuk menghindari adanya pelanggaran tersebut, maka konselor/ guru BK wajib mengkaji secara sadar mengenai tingkah laku dan perbuatannya untuk senantiasa patuh dan taat terhadap kode etik profesi BK. Seorang profesional tentu saja akan menerapkan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat. Penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan keahlian ini tentu akan sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu etika profesi yang dalam hal ini bertindak sebagai "self-control". Karena seorang professional mendapatkan keahliannya melalui proses pendidikan berkualitas tinggi, maka pembentukan

etika profesi juga harus dilakukan oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Inilah yang menyebabkan timbulnya organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi (Alawiyah et al., 2020).

Kompetensi profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 mencakup seorang guru BK yang menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif; menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling (Suprihatin, 2017). Sikap profesional seorang konselor adalah kecenderungan yang menunjukkan bahwa dia adalah konselor yang memiliki sikap profesional, sikap yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional.
- 2) Secara terus-menerus berupaya untuk mengembangkan dan menguasai dirinya.

- 3) Harus mengerti dan memahami kekurangan dan prasangka-prasangka pada diri konselor
- 4) Bertanggungjawab terhadap saran dan peringatan yang diberikan dari rekan seprofesi.
- 5) Mengupayakan mutu kerja setinggi mungkin.
- 6) Terampil dalam menggunakan teknik-teknik khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.
- 7) Peduli terhadap identitas professional dan pengembangan profesi
- 8) Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional.
- 9) Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli.

Dalam meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun layanannya, guru bimbingan dan konseling harus meningkatkan sikap profesionalnya (Sujadi, 2018). Dalam eberapa upaya yang dapat dilakukan guna membentuk konselor profesional (professional counselors) dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan

Calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang

diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Menurut Page & Thomas (dalam Anwar & Mubin, 2020), pendidikan prajabatan merupakan sebuah istilah yang paling lazim digunakan lembaga pendidikan keguruan, yang merujuk pada pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga jenjang universitas pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa berkarir dalam bidang pengajaran.

b. Pengembangan sikap selama dalam jabatan

Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya ataupun secara informal melalui media masa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya (Nurrahmi, 2015; Yuhana et al., 2019). Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap professional keguruan.

Konselor sekolah professional mengimplementasikan kurikulum bimbingan sekolah melalui penggunaan keterampilan-keterampilan mengajar yang efektif dan perencanaan yang mawas terhadap pertemuan

kelompok yang terstruktur bagi para siswa dan juga mengimplementasikan komponen perencanaan dengan membimbing individu-individu dan kelompok-kelompok siswa dan orang tua atau wali mereka melalui pengembangan pendidikan dan perencanaan karir (Pardodi Maba et al., 2018).

BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI PROFESI YANG BERMARTABAT

Bermartabat artinya mempunyai martabat, sedangkan kata dasar martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Berdasarkan arti harfiah martabat tersebut maka bimbingan dan konseling sebagai profesi yang bermartabat artinya profesi bimbingan dan konseling di tengah masyarakat memiliki tingkat harkat dan harga diri yang tinggi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada konseli pada setting pendidikan formal dan setting community, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, tolong menolong/saling membantu, toleransi, kesopanan, dan tenggang rasa.

Konselor/guru bimbingan dan konseling sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang berhasil memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli biasanya menunjukkan sikap humanistik, seperti tulus, jujur, hangat, penuh penerimaan, selaras pikirannya, perasaan, dan perbuatannya.

Bimbingan dan konseling sebagai profesi yang sedang berkembang di negara Indonesia, harus dapat merebut kepercayaan publik (public trust) melalui peningkatan mutu unjuk kerja yang dilakukan oleh guru BK atau konselor yang profesional dalam bidang tugasnya. Masyarakat akan percaya bahwa layanan yang diperlukan itu hanya dapat diperoleh dari guru BK atau konselor yang memiliki kompetensi dan keahlian yang terandalkan. Kepercayaan publik inilah yang menjadi faktor kunci untuk mengokohkan identitas profesi.

Kemartabatan profesi bimbingan dan konseling ditunjukkan oleh dua ciri, yaitu dipercaya masyarakat (public trust), dan dibutuhkan masyarakat (needed community). Agar dapat dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat, pelayanan bimbingan dan konseling harus bermutu, dikelola dengan baik yang didukung oleh fasilitas yang memadai, dijamin, dikembangkan, dan demokratis. Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu yaitu konselor/guru bimbingan dan konseling yang menguasai kompetensi bimbingan dan konseling dalam tingkat tinggi, sehingga memiliki daya competitiveness yaitu kemampuan bersaing secara positif dengan profesi lain yang ditunjukkan oleh kinerja tinggi bagi pengampu profesi bimbingan dan konseling di tengah kehidupan masyarakat global.

Dalam meningkatkan profesionalisasi, konselor/guru bimbingan dan konseling melakukan pengembangan diri yang dapat dilakukan melalui studi lanjut (S2 dan S3 yang relevan dengan bidang tugasnya), terlibat aktif dalam seminar/workshop/ pelatihan sebagai peserta atau pemakalah, melakukan penelitian, dan menulis karya ilmiah pada jurnal atau bentuk publikasi lain yang menunjang profesi bimbingan dan konseling. ABKIN dan divisi-divisinya berwenang untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan konselor/guru bimbingan dan konseling.

Peran ABKIN sebagai organisasi profesi sangat urgen dalam memajukan profesi bimbingan dan konseling. ABKIN diharapkan mampu sebagai regulator untuk mengembangkan dan memberlakukan norma-norma profesi seperti kode etik, standar kompetensi, model pengembangan profesi melalui pendidikan profesi yang bermutu, melakukan audit profesi dan supervisi secara profesional, memberikan izin praktik dan membangun sistem pengawasan praktik profesi, melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah tentang berbagai hal yang terkait dengan eksistensi, kewenangan, kewajiban dan hak profesi, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah yang diikuti oleh anggotanya secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai demokratis, tidak

diskriminatif, nilai keagamaan, dan nilai kultural kebangsaan.

Peran pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi juga sangat menentukan kemajuan profesi bimbingan dan konseling. Sebagai regulator yang melaksanakan produk politik Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dibutuhkan konsistensi dalam menerapkan kebijakan pemerintah yang mendukung profesi pendidik untuk tumbuh dan berkembang dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi (nations competitiveness).

PROFESI TENAGA BIMBINGAN DAN KONSELING YANG BERMARTABAT

Bimbingan dan konseling sebagai profesi yang sedang berkembang di negara Indonesia, harus dapat merebut kepercayaan publik (public trust) melalui peningkatan mutu unjuk kerja yang dilakukan oleh guru BK atau konselor yang profesional dalam bidang tugasnya. Kepercayaan publik inilah yang menjadi faktor kunci untuk mengokohkan identitas profesi dan memungkinkan anggota profesi akan menjalankan fungsinya di dalam cara-cara

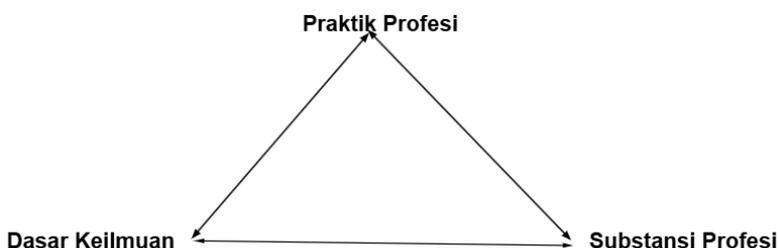
professional. Kinerja konselor yang bermartabat sangat tergantung pada tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya melalui proses pendidikan dan pelatihan dari institusi yang kredibel. Seorang konselor harus mempunyai lisensi atau sertifikasi yang mengindikasikan bahwa pemiliknya berhasil menyelesaikan suatu pendidikan dan pelatihan dan sudah diuji berdasarkan kriteria belajar dan pengalaman yang direkomendasikan organisasi profesional yang representatif, dan lembaga/badan pelisensian yang tepat.

Menurut Mc Cully (1962:682) menyatakan “sebuah profesi merupakan pekerjaan yang di dalamnya anggota-anggota suatu kelompok profesional memastikan kompetensi-kompetensi minimum siapapun yang ingin memasuki bidang kerja mereka, biasanya dilakukan dengan cara menetapkan dan menegakkan standar penyeleksian, pelatihan, dan pelisensian atau sertifikasi”. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi konselor dipersyaratkan bahwa kualifikasi konselor minimal sarjana pendidikan (S-1) Bidang Bimbingan dan Konseling dan tamatan Pendidikan Profesi Konselor (PPK), dan memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Sebagai penyandang gelar profesi bimbingan dan konseling, konselor harus memiliki kompetensi:

- ✚ Memahami secara mendalam klien yang hendak dilayani;
- ✚ Menguasai landasan teoritik keilmuan pendidikan dan bimbingan dan konseling;
- ✚ Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap klien; dan
- ✚ Mengembangkan pribadi dan profesionalitas diri secara berkelanjutan.

Konselor dalam menjalankan profesi konseling harus benar-benar dipersiapkan dan dibina dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini melalui pendidikan profesi dan sarana pembinaan lainnya, sehingga menjadi profesi yang benar-benar bermartabat. Konselor harus dapat mewujudkan dalam dirinya dalam bentuk spectrum suatu profesi konselor yang dapat digambarkan dalam bentuk trilogy. Bentuk trilogy sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



Keterangan:

Dalam suatu profesi konselor diidentifikasi tiga komponen yang secara langsung saling terkait, apabila salah satu atau lebih komponen itu tidak ada, maka profesi konselor akan kehilangan eksistensinya.

- Dasar Keilmuan

Komponen Dasar Keilmuan menyiapkan calon konselor landasan dan arah tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan profesi konseling. Konselor diwajibkan menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar dari keseluruhan kinerja professional dalam bidang pelayanan konseling, karena konselor termasuk ke dalam kualifikasi pendidik. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6. Dengan keilmuan inilah konselor akan menguasai dengan baik kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagai dasar dalam memahami peserta didik (sebagai sasaran pelayanan konseling) dan memahami seluk beluk proses pembelajaran yang akan dijalani peserta didik (dalam hal ini klien) melalui modus pelayanan konseling.

- Substansi Profesi Konseling

Memberikan modal tentang apa yang menjadi fokus dan obyek praktikspesifik profesi

dengan bidang kajiannya, aspek kompetensi, pendekatan dan teknologi pelayanan, pengelolaan dan evaluasi serta sarana operasional dan manajemen kode etik serta landasan praktik operasional pekerjaan konseling. Secara keseluruhan substansi tersebut sebagai modus pelayanan konseling. Obyek praktis spesifik yang menjadi fokus pelayanan konseling adalah kehidupan efektif sehari-hari (KES).

- **Praktik Profesi**

Praktik Pelayanan Konseling merupakan realisasi pelaksanaan pelayanan profesi konseling setelah kedua komponen profesi (dasar keilmuan dan substansi profesi) dikuasai. Praktik konseling terhadap sasaran pelayanan merupakan puncak dari keberadaan bidang konseling dalam setting pendidikan formal, pendidikan nonformal, keluarga, instansi negeri maupun swasta dunia usaha/industry, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, maupun praktik pribadi (privat). Mutu pelayanan konseling diukur dari penampilan (unjuk kerja, kinerja, performance) praktik pelayanan konseling oleh konselor terhadap sasaran layanan.

Berdasarkan penjelasan ketiga komponen trilogi profesi diatas maka dapatlah dikatakan bahwa suatu profesi bimbingan dan konseling tanpa dasar keilmuan yang tepat akan

mewujudkan kegiatan professional bimbingan dan konseling yang tanpa arah dan/atau bahkan malpraktik. Tanpa substansi profesi, suatu profesi bimbingan dan konseling itu juga akan kecil dan dipertanyakan isi dan apa manfaatnya. Serta tanpa praktik profesi, maka profesi bimbingan dan konseling akan menjadi tidak terwujud, dimana dipertanyakan eksistensinya, dan tenaga seorang professional bimbingan dan konselor tidak berarti apa-apa bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Maka jika salah satu komponen tersebut tidak dilakukan oleh seorang guru BK dan Konselor maka berarti profesi bimbingan dan konseling menjadi tidak bermartabat dan tidak dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dalam kaitan itu semua, ketiga komponen Trilogi Profesi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, karena ketiganya merupakan kesatuan, dan dipelajari dalam program pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi Konselor untuk mewujudkan kemartabatan dan public Trust profesi bimbingan konseling di negara Indonesia.

Konselor dalam menyiapkan generasi emas Indonesia pada masyarakat multicultural dan modern dilakukan melalui pelayanan konseling yang bermartabat. Pelayanan profesi bimbingan konseling yang bermartabat akan dapat diwujudkan dalam kinerjanya didukung oleh kondisi:

- a. Pelayanan bermanfaat, yaitu pelayanan professional yang diselenggarakan oleh konselor haruslah benar-benar bermanfaat bagi Masyarakat luas.
- b. Pelaksana bermandat, yaitu pelayanan professional bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh konselor yang bermandat. Pelayanan konseling harus dilakukan oleh tenaga yang benar-benar dipercaya untuk menghasilkan tindakan dan produk produk pelayanan dalam mutu yang tinggi. pendidikan profesi BK yang terpadu dan sinambung merupakan sarana dasar dan esensial untuk menyiapkan pelaksana bermandat. Lulusan pendidikan profesi BK diharapkan menjadi tenaga professional handal yang layak memperoleh kualifikasi bermandat, baik dalam arti akademik, kompetensi, maupun posisi pekerjaannya.
- c. Pengakuan sehat, yaitu pelayanan professional bimbingan dan konseling diakui secara sehat oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan kemanfaatan yang tinggi dan dilaksanakan oleh pelaksana yang bermandat, pemerintah dan masyarakat tidak ragu-ragu mengakui dan memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan ketiga pelayanan Profesi Bimbingan dan Konseling maka hal tersebut dapat

menjamin tumbuh suburnya profesi konseling yang menjadi profesi bermartabat. Selain itu bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang sedang berkembang, para anggota profesi BK harus berusaha memenuhi standar konselor agar konseling dapat merebut kepercayaan publik (public trust) melalui peningkatan kinerja konselor dalam pelayanan konseling bermartabat. Kekuatan eksistensi suatu profesi bergantung kepada public trust (Brigg & Blocher, 1986).

Public trust akan sangat mempengaruhi konsep profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi dengan cara-cara professional. Public trust akan melanggengkan profesi konseling, karena dalam public trust terkandung keyakinan public bahwa profesi dan para anggotanya berada dalam kondisi yang memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi, memiliki perangkat ketentuan yang mengatur perilaku professional dan melindungi kesejahteraan public dan anggota profesi BK dimotivasi untuk melayani pengguna dan pihak-pihak terkait dengan cara terbaik, dan memiliki komitmen untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan finansial (Gladding, S.T., 1988).

1. Ciri-Ciri Profesi Bimbingan Konseling

Menurut Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022) menyatakan suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu. Bimbingan dan konseling merupakan suatu profesi. Hal ini terlihat dari ciri-ciri profesi sebagai berikut:

- a) Bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh petugas yang disebut guru pembimbing atau konselor (sekolah) yang merupakan lulusan dari pendidikan keahlian, yakni lulusan perguruan tinggi Jurusan atau Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- b) Kegiatan bimbingan dan konseling merupakan pelayanan kemasyarakatan dan bersifat sosial. Dalam melaksanakan layanan, guru pembimbing menggunakan berbagai metode atau teknik ilmiah.
- c) Memiliki organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) yang saat didirikan tanggal 12 Desember 1975 di Malang dikenal dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Sebagai sebuah organisasi, ABKIN memiliki AD/ART maupun kode etik.
- d) Ada pengakuan dari masyarakat/pemerintah, seperti tercantum dalam SK Mendikbud Nomor 25 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa IPBI (saat ini ABKIN) sejajar dengan PGRI dan ISPI. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6 menetapkan konselor sebagai salah satu jenis kualifikasi pendidik.

- e) Para anggota profesi bimbingan dan konseling memiliki keinginan untuk memajukan diri, baik wawasan pengetahuannya maupun keterampilannya, yakni melalui kegiatan seminar, pelatihan, workshop, atau pertemuan ilmiah lainnya. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kegiatan.
- f) Dilakukan oleh konselor/guru bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan yang memenuhi ciri-ciri profesi. Dengan demikian, bimbingan dan konseling merupakan suatu profesi dan para petugas bimbingan dan konseling, yakni konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling, merupakan tenaga profesional.

2. Syarat-Syarat Profesi BK

Mengingat tugas dan tanggung jawab konselor, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus, antara lain:

- a) Menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. seseorang yang ingin memiliki Profesi terutama pada profesi konselor menuntut untuk menguasai pengetahuan

atau teori psikologi, pendidikan komunikasi dan pemahaman sosial lainnya yang mendalam. Keterampilan seorang profesi atau profesi konselor nantinya tidak hanya fokus pada pengalaman tetapi pada pemahaman serta pengetahuan.

- b) Menekankan suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. dengan bidang profesinya. Konselor harus memiliki keahlian di segala aspek bidang seperti : Konseling Individu, Konseling Keluarga dan juga Konseling Kelompok. Bidang bidang konseling tersebut didapat dari pelatihan yang diikuti.
- c) Menuntut adanya tingkat pendidikan profesi konselor yang sesuai standar. Untuk menjadi konselor yang profesional harus menyelesaikan pendidikan formal. Seorang profesi konselor tentunya harus menyelesaikan pendidikan sarjana S1 dan lebih diharapkan untuk menyelesaikan ke jenjang Magister S2 dan lebih efisien lagi Mengambil profesi sesuai bidangnya. Seorang Konselor disarankan untuk mengambil Profesi Konselor untuk bisa lebih sempurna agar sesuai standar pendidikan di Indonesia

Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan pekerjaan yang dilaksanakan. yang dilaksanakan. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan

dinamika kehidupan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi, antara lain:

- 1) Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan aksanakan tugas dan fungsinya.

seorang yang memiliki Profesi konselor memiliki kode etik yang memiliki fungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kode etik ini didalamnya memuat prinsip-prinsip dasar seperti kerahasiaan, kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab. Kode etik tentunya memiliki tujuan yaitu untuk melindungi kepentingan konseli dan menjaga integritas profesi konselor itu sendiri. Dengan mengikuti kode etik yang ada, konselor dapat memastikan layanan yang diberikan kepada konseli berjalan sesuai standar layanan dan tidak menyimpang dari norma-norma profesional.

- 2) memiliki konseli/objek layanan tetap.

Konselor biasanya mempunyai konseli tetap sesuai dengan bidangnya misalnya siswa di sekolah, atau konseli dari luar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa konseling merupakan proses berkelanjutan, bukan hanya pertemuan satu kali. Hubungan profesional yang berkelanjutan ini memungkinkan konselor memahami

perkembangan dan kebutuhan konseli secara lebih mendalam.

- 3) diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. Ditilik dan dirinci dari sisi profesi, ada tiga hal yang termasuk ke dalam syarat profesi, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan yang bermanfaat, pelaksana yang bermandat, dan bermanfaat, pelaksana yang bermandat, dan pengakuan yang sehat. Profesi Konselor diakui dan dihargai di tengah masyarakat karena dianggap membantu masalah Psikologi, Sosial dan Akademik. Dengan demikian keberadaan konseli sangat berpengaruh dan berperan penting di tengah masyarakat.

3. Permasalahan Profesi Bimbingan dan Konseling

Perkembangan profesi bimbingan dan konseling telah melewati beberapa zaman/era, dari era konvensional/tradisional sampai pada era modern yang berimplikasi pada kebutuhan dan pola hidup masyarakat. Di dalam era modern yang bercirikan penggunaan teknologi informasi (IT) pada berbagai aktivitas kehidupan, semua profesi termasuk profesi bimbingan dan konseling sebagai pihak yang kena dampaknya, baik positif yang menguntungkan maupun negatif yang merugikan. Dampak negatif yang berbahaya bagi profesi

bimbingan dan konseling adalah bisa mati, karena tidak lagi dibutuhkan oleh peserta didik/konseli, dan bisa teralihkan ke profesi psikologi di lembaga pendidikan formal. Untuk mengantisipasi agar dampak negatif tersebut tidak terjadi, semua warga profesi bimbingan dan konseling yang tergabung pada organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) harus melakukan upaya cerdas dalam mengembangkan profesi bimbingan dan konseling di tanah air.

Bimbingan dan konseling sebagai profesi di tanah air menghadapi sejumlah masalah dalam praktik profesi di sekolah dan belum mampu menjadikan profesi ini sebagai komoditas yang dibutuhkan oleh peserta didik/konseli. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi yaitu:

- a) Masih terdapat konselor atau guru BK yang belum memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling yang pada akhirnya memengaruhi penguasaan kompetensi profesional mereka.

Permasalahan ini akan berdampak signifikan terhadap penguasaan kompetensi profesional guru BK dalam memberikan sebuah layanan bimbingan yang efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Kurangnya latar belakang akademik yang memadai menyebabkan banyak guru BK belum mampu memahami

secara menyeluruh konsep-konsep dasar, prinsip, serta pendekatan-pendekatan yang tepat dalam proses konseling, baik individual maupun kelompok. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, serta menjadikan keberadaan profesi ini kurang mendapat tempat di hati peserta didik. Kualifikasi akademik yang tidak sesuai juga menghambat pengembangan program-program bimbingan berbasis data dan kebutuhan riil siswa, sehingga layanan yang diberikan menjadi bersifat normatif dan tidak adaptif terhadap dinamika perkembangan peserta didik di era digital saat ini.

Idealnya, seorang konselor sekolah harus memiliki kompetensi akademik dan profesional sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah, serta merujuk pada standar kompetensi konselor yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan juga berdampak pada ketidakmampuan guru BK dalam menerapkan teknologi informasi dalam layanan bimbingan, yang seharusnya menjadi salah satu tuntutan penting di era revolusi industri 4.0.

- b) Masih ada pandangan bahwa tugas sebagai guru BK dapat diemban oleh siapa saja, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan S-1 BK, bahkan terkadang jabatan ini diberikan kepada guru mata pelajaran yang kekurangan jam mengajar agar memenuhi beban kerja 24 jam per minggu.

Praktik semacam ini tidak hanya mencederai profesionalisme profesi BK, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik. Guru yang tidak memiliki kompetensi akademik dan keterampilan dasar dalam bidang konseling berpotensi melakukan pendekatan yang tidak tepat dalam menangani permasalahan siswa, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko psikologis yang lebih besar. Padahal, bimbingan dan konseling merupakan bidang keilmuan tersendiri yang membutuhkan kompetensi khusus dalam aspek konseptual, teknis, dan etik profesional.

- c) layanan bimbingan dan konseling di sekolah sering kali dianggap tidak terlalu penting, selama kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar.

Pandangan ini menyebabkan guru BK diposisikan sebagai pelengkap sistem pendidikan, bukan sebagai mitra strategis

dalam membentuk karakter, keterampilan sosial, dan kesiapan karier peserta didik. Hal ini tentu menjadi hambatan besar dalam upaya membangun budaya konseling di lingkungan sekolah. Minimnya pemahaman terhadap fungsi preventif, kuratif, dan pengembangan dari layanan BK membuat para pemangku kebijakan sekolah kurang memberi ruang bagi penguatan peran konselor. Akibatnya, berbagai potensi dan masalah siswa yang seharusnya dapat ditangani lebih dini menjadi terabaikan.

- d) Sarana dan prasarana yang mendukung layanan BK di banyak sekolah belum mencukupi, meskipun pada saat proses akreditasi sekolah seolah-olah telah memenuhi standar yang diperlukan.

Permasalahan yang sedang terjadi saat ini yaitu sarana dan prasarana yang menunjang layanan Bimbingan dan Konseling di banyak sekolah pada kenyataannya masih belum memadai, baik dari sisi ruang konseling yang layak, perangkat teknologi pendukung, maupun alat tes psikologis yang memadai. Meskipun saat proses akreditasi sekolah seringkali tampak seolah telah memenuhi standar yang ditetapkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak fasilitas tersebut hanya bersifat sementara atau fiktif demi memenuhi persyaratan administratif. Ketiadaan ruang konseling yang nyaman dan

privat, misalnya, menghambat terlaksananya proses konseling yang efektif dan sesuai etika. Padahal, ruang fisik yang mendukung sangat berpengaruh terhadap kenyamanan konseli dalam membuka diri dan membicarakan permasalahannya.

- e) Ketentuan dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang rasio ideal satu orang konselor untuk 150 peserta didik belum bisa direalisasikan secara merata di seluruh satuan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil atau sekolah dengan keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan layanan klasikal di kelas karena keterbatasan jumlah tenaga BK.

Kondisi ini menyebabkan satu orang guru BK harus menangani ratusan siswa sekaligus, yang tentu berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Beban kerja yang tidak seimbang ini menyulitkan pelaksanaan layanan klasikal secara optimal, apalagi jika ditambah dengan tanggung jawab administratif lainnya. Akibatnya, pendekatan individual maupun kelompok yang seharusnya dapat dilakukan secara rutin, menjadi terbengkalai atau hanya dilakukan secara insidental.

- f) Tidak semua perguruan tinggi penyelenggara program studi S-1 BK memiliki kualitas yang

memadai baik dari aspek kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas pendukung, maupun keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas lulusan.

Permasalahan ini tentu berdampak pada rendahnya kualitas lulusan yang dihasilkan, yang kemudian berkontribusi pada lemahnya penguasaan kompetensi profesional saat memasuki dunia kerja dan mereka menghadapi kesulitan dalam menerapkan keterampilan konseling secara praktis, baik dalam setting individual maupun kelompok. Kurangnya pengalaman praktik lapangan yang terstruktur dan supervisi yang kuat di masa studi juga menjadi faktor penghambat utama dalam membentuk konselor profesional yang siap pakai. Di tengah tuntutan perkembangan zaman yang kian kompleks, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi BK agar mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi holistik, baik dari sisi akademik, etika, maupun kepekaan sosial.

- g) Regulasi dan kebijakan dalam bidang BK masih belum konsisten, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan ini memunculkan kebingungan di kalangan praktisi BK,

terutama dalam menginterpretasikan batasan kewenangan, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang harus dijalankan oleh guru BK. Di satu sisi, peraturan seperti Permendikbud No. 111 Tahun 2014 sudah cukup komprehensif dalam mengatur teknis layanan BK. Namun, di sisi lain, implementasi di lapangan sering tidak didukung oleh instrumen pendukung yang memadai, baik dari sisi petunjuk teknis maupun supervisi dari dinas pendidikan setempat. Ketidaksinkronan antar regulasi dan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi kendala serius dalam menjamin keberlangsungan layanan BK yang profesional dan berstandar nasional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih terintegrasi dan berpihak pada penguatan peran strategis BK dalam sistem pendidikan nasional.

- h) Masih rendahnya kesadaran dan penghayatan terhadap nilai-nilai profesionalisme di kalangan tenaga pendidik yang menjalankan layanan bimbingan dan konseling menjadi tantangan serius dalam upaya memajukan profesi ini.

Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, empati, serta komitmen terhadap kode etik konselor belum sepenuhnya dipahami dan dijadikan pedoman dalam praktik sehari-hari. Hal ini menyebabkan masih

ditemukannya perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan etika profesi, seperti membuka rahasia konseli, pendekatan yang menghakimi, atau bahkan menjadikan layanan konseling sebagai beban administratif semata. Padahal, profesionalisme merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan konseli terhadap konselor. Tanpa kesadaran terhadap nilai-nilai ini, sulit bagi layanan BK untuk benar-benar memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik secara optimal.



BAB X

CONTOH KASUS

Seorang siswa SMP di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, menjadi menjadi korban bullying hingga pingsan. Video insiden tersebut viral dan menunjukkan kekerasan fisik yang dialami korban oleh teman-temannya, memicu keprihatinan publik terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Dalam hal ini peran guru Bk sangat penting sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan. Guru BK dapat mengambil langkah awal dengan melakukan asesmen terhadap semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun saksi, untuk memahami latar belakang dan motif perilaku yang terjadi. Selanjutnya, guru BK bisa mengadakan sesi konseling individu bagi pelaku untuk menggali penyebab serta membangun kesadaran tentang dampak dari tindakannya. Terhadap korban, guru BK memberikan konseling pemulihan dan penguatan diri agar tidak merasa trauma atau terisolasi. Selain itu, guru BK juga dapat melakukan intervensi melalui layanan bimbingan kelompok yang bertujuan menumbuhkan empati, nilai-nilai toleransi, dan keterampilan sosial. Tidak kalah penting, guru BK bisa bekerja sama dengan wali kelas, orang tua, dan pihak manajemen sekolah untuk menyusun strategi pencegahan jangka panjang, seperti program anti-

perundungan atau kampanye literasi digital. Dengan begitu, sebagai seorang guru Bimbingan dan Konseling (BK), dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Guru BK diharapkan mampu memberikan pelayanan yang penuh empati, memahami kebutuhan siswa secara menyeluruh, serta menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung di lingkungan sekolah. Selain itu, guru BK juga berperan penting dalam membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan, baik secara akademik, pribadi, sosial, maupun emosional. Dengan sikap profesional, sabar, dan penuh kasih sayang, guru BK dapat menjadi tempat curhat yang aman bagi siswa serta menjadi penuntun dalam perkembangan karakter dan potensi mereka.

Berikut beberapa pembahasan tentang bentuk-bentuk bullying fisik dan strategi yang digunakan guru BK dalam mengatasi bullying di Sekolah:

Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying Fisik

Bullying fisik merupakan salah satu bentuk perilaku perundungan yang paling mudah dikenali karena melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban. Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan

fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Yang termasuk jenis penindasan secara fisik adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, mengigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas sehingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang ditindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin bahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius. Anak yang secara teratur memainkan peran ini kerap merupakan penindasan yang paling bermasalah diantaranya para penindas lainnya, dan yang paling cenderung beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih serius. Bentuk-bentuk perilaku bullying fisik yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun remaja antara lain memukul, menendang, mendorong, menampar, menjambak, mencubit, melempar barang ke arah korban, hingga mengancam dengan senjata atau membuat korban terpojok secara fisik. Selain itu, perilaku seperti merampas atau merusak barang milik korban, memaksa korban memberikan uang atau barang, serta mengunci korban di ruang tertutup juga termasuk dalam kategori bullying fisik. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis dan

rasa tidak aman pada korban. Nadhirah, & Saripah (2023).

Strategi Guru BK dalam Mengatasi Bullying di Sekolah

Menurut Rahmadani dan Hidayat (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan strategi yang diterapkan guru dalam pencegahan bullying ialah, dengan mengetahui akar permasalahan bullying, memberikan hukuman kepada pelaku bullying, memberikan himbauan, layanan serta peringatan kepada pelaku bullying dan juga dengan menerapkan program-program pada pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter ialah dengan memberi teguran kepada siswa yang melakukan, bertindak tegas memberikan nasehat dan peringatan kepada siswa yang terlibat, dan meminta siswa tersebut untuk membuat perjanjian. Jika masih mengulangi akan diberi hukuman hingga dipanggil orang tuanya. Hukuman yang diberikan seperti berdiri di depan kelas atau diluar kelas, memungut sampah, serta membersihkan WC.

Strategi guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mengatasi bullying di sekolah meliputi beberapa langkah penting yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik.

Guru BK berusaha mencari akar permasalahan dengan bertanya langsung kepada siswa pelaku bullying untuk memahami alasan di balik tindakannya. Selanjutnya, guru memberikan hukuman (punishment) sebagai efek jera agar perilaku bullying tidak terulang.

Guru BK memberikan nasehat dan himbauan kepada pelaku maupun siswa yang berpotensi menjadi pelaku bullying, serta melakukan bimbingan secara individu maupun kelompok.

Strategi lain yang diterapkan adalah memberikan layanan informasi, orientasi, dan mediasi, serta memberikan penghargaan (rewarding) untuk perilaku positif. Guru BK juga dapat membuat program “stop bullying” dan melakukan pengawasan (monitoring) secara berkala di lingkungan sekolah.

Kerja sama dengan orang tua juga menjadi bagian penting dalam strategi ini, baik untuk mendamaikan maupun memberikan pemahaman agar orang tua lebih memperhatikan perilaku anak di rumah.

Strategi-strategi ini telah terbukti efektif dalam menurunkan kasus bullying dan membangun suasana sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa. (Wahdanah & Saputri, 2022).



EH, EH,
LIHAT
DEH... SI
CUPU
LEWAT.
HAHAHA!

AKU SALAH APA
SIH...? KENAPA
MEREKA SELALU
MENGEJEK
AKU...?





KASIAN YA,
UDAH CULUN,
DIEM AJA...
GIMANA MAU
PUNYA
TEMEN? MAU
KITA AJARIN
CARANYA JADI
MANUSIA
NORMAL?



ATAU
JANGAN-JANG
AN, LO EMANG
COCOKNYA
BERTEMAN
SAMA
TEMBOK?
SAMA-SAMA
NGSAK ADA
SUARANYA,
NGSAK ADA
SUNANYA.







PAK, MAAF, APAKAH BAPAK TAHU DI MANA CHRISTINE? DIA BELUM KELUAR JUGA DARI KELAS, SUDAH LEWAT WAKTU PULANG.

KENAPA BELUM KELUAR JUGA? SUDAH LAMA NIH, BIASANYA DIA SUDAH SELESAI. APA ADA SESUATU DI KELAS?

SEPERTINYA DIA MASIH DI DALAM, PAK. MUNGKIN ADA KEGIATAN ATAU TUGAS YANG BELUM SELESAI. SAYA CEK SEBENTAR.



YA AMPUN, KENAPA DIA PINGSAN? AYO CEPAT, PAK, KITA HARUS SEGERA MEMBAWA DIA KE RUMAH SAKIT!



YA AMPUN, KENAPA DIA PINGSAN? AYO CEPAT, PAK, KITA HARUS SEGERA MEMBAWA DIA KE RUMAH SAKIT!



APA YANG TERJADI, NAK?
KENAPA KAMU BISA
PINGSAN SENDIRIAN DI
KELAS?



*CHRISTINE
MENCERITAKAN
SEMUA YANG
TERJADI DI
KELAS KEPADA
ORANG
TUANYA*

KEESOKAN HARINYA...



SELAMAT PAGI, BU.
SAYA INGIN
MELAPORKAN KEJADIAN
YANG TERJADI PADA
ANAK SAYA. KEMARIN
DIA MENGALAMI
PERUNDANGAN DI
SEKOLAH, DAN SAYA
MERASA HAL INI PERLU
DITINDAKLANJUTI
SEGERA. MOHON
BANTUANNYA AGAR
KASUS INI TIDAK
TERULANG LAGI.



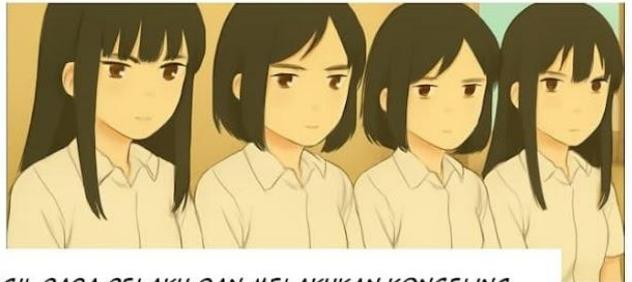
BENARKAH? SAYA SANGAT
TERKEJUT MENDENGARNYA. TERIMA
KASIH SUDAH MELAPOR, KAMI AKAN
SEGERA MENINDAKLANJUTI HAL INI.



BEBERAPA HARI SETELAH CHRISTINE PULIH DAN KEMBALI KE SEKOLAH, IA DIPANGGIL OLEH GURU BK UNTUK MENEMUI DIRINYA DI RUANG BK.



SAAT KONSELING BERSAMA CHRISTINE, GURU BK AKHIRNYA MENGETAHUI SIAPA SAJA PELAKUNYA. GURU BK PUN MEMBERIKAN PENGUATAN BAGI KORBAN PADA SAAT SESI KONSELING TERSEBUT.



GURU BK AKHIRNYA MEMANGGIL PARA PELAKU DAN MELAKUKAN KONSELING KEPADA MEREKA. MEREKA JUGA DIBERIKAN HUKUMAN YANG SESUAI.





GURU BK DAN PERANGKAT SEKOLAH MEMBUAT PROGRAM SEKOLAH ANTI-BULLYING UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN PARA SISWA-SISWI AGAR TIDAK MELAKUKAN TINDAK PERUNDUNGAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Harahap,dkk | jurnal Pendidikan dan
Konseling, Volume 4 No. 6 Tahun 2022
- Aulia. (2022). Profesi Merupakan Bagian Dari
Pekerjaan.
<http://dx.doi.org/10.31237/osf.io/d9z8k>
- Deliani, N. (2018). Bimbingan Konseling Pada
Masyarakat Multikultural. Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam, 11–27.
- Ela Fatimah, Bahrul Ulum, Nur Hayati, Elsa
Margio Reta, Abdul Rosyid. Penerapan Prinsip
- prinsip kurikulum merdeka belajar bagi
para calon konselor. Jurnal Citra Pendidikan,
3 (1),
<https://doi.org/10.38048/jcp.v3i1.1457>
- Fadillah, N., & Astuti, R. (2022). Profesionalisme
Konselor Sekolah dalam Pelaksanaan
Layanan Bimbingan dan Konseling di Era
Digital. Jurnal Konseling Edukasi, 6(1), 22–
30. <https://doi.org/10.26486/jke.v6i1.1032>
- Fatimah, E., Ulum, B., Hayati, N., Reta, E. M., &
Rosyid, A. (2023). Penerapan prinsip-prinsip
kurikulum merdeka belajar bagi para calon
konselor. Jurnal Citra Pendidikan, 3(1), 665-
670.
- Hartono. (2015). Konseling Komunitas : Tantangan
bagi Konselor di Kawasan ASEAN. In Seminar
Nasional Bimbingan dan Konseling " Profesi

BK di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

- Hartono. (2018). Profesi Bimbingan dan Konseling di Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan. *Osf.Io*, 1(1), 1–6. <https://www.youtube.com/watch?v=Gpb-JNyWuWs>
- Hidayat, R., & Fitria, N. (2021). Tinjauan Kebijakan dan Regulasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 55–63. <https://doi.org/10.21009/jakpen.101.07>
- Jarkawi, H. (2019). PROFESI GURU BIMBINGAN dan KONSELING DI ERA GLOBALISASIBERBASIS PENELITIAN. *JBKR: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 1(2), 28–40.
- Kusmawati, A. (2019). Modul Konseling. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1–17.
- Lestari, I., & Fitriani, E. (2020). Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2(3), 78–85. <https://doi.org/10.24036/1156789>
- Lestari, W. A., Ahman, & Yustiana, Y. R. (2023). Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0.

JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi, 3(1), 10–18.

Mufaridah, H., Anggraini, D. M., & Budianto, A. A. (2023). Kurikulum Merdeka Dan Telaah Peran Konselor Di Sekolah. *Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 5(1), 65-73.

Munandir, M. (2020). Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling Melalui Program Pengembangan Berkelanjutan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 8(1), 45–52.
<https://doi.org/10.29210/118900>

Nandang Budiman, Nurlaila Lathifa Kusumaningsih, & Nadhia Aulia Nadhira. (2023). Guru Bimbingan Dan Konseling Sebagai Profesi Khusus. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 91–101.
<https://doi.org/10.58192/insdun.v2i3.977>

Nurshabrina, D. R., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2024). Kualitas Pribadi Konselor: Kunci Untuk Hubungan Yang Sukses Dalam Konseling. *Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(2).
<https://journal.upgris.ac.id/index.php/EMPAATI/article/view/18012/bahasa>

Olas Astawa, I. M. (2016). Profesi Tenaga Bimbingan Dan Konseling Yang Bermartabat.

- Jurnal Penjaminan Mutu, 1(2), 49.
<https://doi.org/10.25078/jpm.v1i2.50>
- Pekerjaan, P. D. A. N. (2019). Profesi, profesional dan pekerjaan. 2, 61–69.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2575110>
- Prasetya, M. A. (2014). Korelasi Antara Bimbingan Konseling Islam dan Dakwah. *Addin*, 8(2), 409–424.
- Prayitno, E. (2008). Prayitno, MENGATASI KRISIS IDENTITAS PROFESI KONSELOR Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis. 1–117.
- Putri.A.R., Anjani.A. & Afifah.F.M. (2023).Konsep Bimbingan Konseling Karir Bagi Siswa SMA. *Jurnal Ilmiah kopendik (konseling pendidikan)*,Vol. 2, No. 2, Hal 53-65
- Qurniati, Q., Dharminto, M., Hoiriyah, E., & Zahara, E. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Ri Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor Di Sma Bhakti Suci Jaya Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 4(2), 97-112.
- Rofiq, A. A., & A'yun, A. Q. (2025). Meningkatkan kompetensi konselor komunitas musyawarah guru BK Madrasah Tsanawiyah Kota Surabaya melalui pelatihan hipno konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(1), 184–193. <https://doi.org/10.29210/1125900>

- Sianturi, R., Luthfillah, N., Zakiyyah, H., & Wulandari, R. (2022). Status Profesi Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Journal of Education Research*, 3(2), 42–47. <https://doi.org/10.37985/jer.v3i2.75>
- Sukardi, M., & Latipun. (2021). Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling dalam Konteks Pendidikan Abad 21. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 6(2), 120–130. <https://doi.org/10.17977/um001v6i22021p120>
- Syahri, L. M., Mudjiran, M., Sukma, D., & Syahrial, S. (2022). Kesiapan konselor dalam proses konseling yang berhasil. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 2(2), 82–91
- Ulfah, U. (2022). Pelatihan Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling untuk Meningkatkan Layanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, 6(2), 237–246. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/20244%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/20244/14048>
- Wahyuni, S., & Suryadi, A. (2020). Evaluasi Kualitas Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling di Indonesia. *Jurnal Psikoedukatif*, 8(2), 95–104.

<https://doi.org/10.23969/psikoedukatif.v8i2.567>

Wibowo, A., & Yuniarti, D. (2022). Implementasi Kebijakan Rasio Ideal Guru BK terhadap Jumlah Siswa di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 66–74.

<https://doi.org/10.1234/jipk.v5i1.12345>

Yuliawanti, R. (2019). Peran Kolaboratif Konselor di Sekolah Inklusif. *Jurnal Ide Guru*, 4(1), 68-74.

Zu'ma.R.A.(2023). Relevansi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan Layanan Bimbingan Konseling dalam Konteks Kurikulum Merdeka. *Jurnal pendidikan konseling*.Volume 5 Nomor 2.



ukipressdigital.uki.ac.id



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-8737-70-3 (no. jil. lengkap)

ISBN 978-623-8737-72-7 (jil. 2)



9

786238

737727